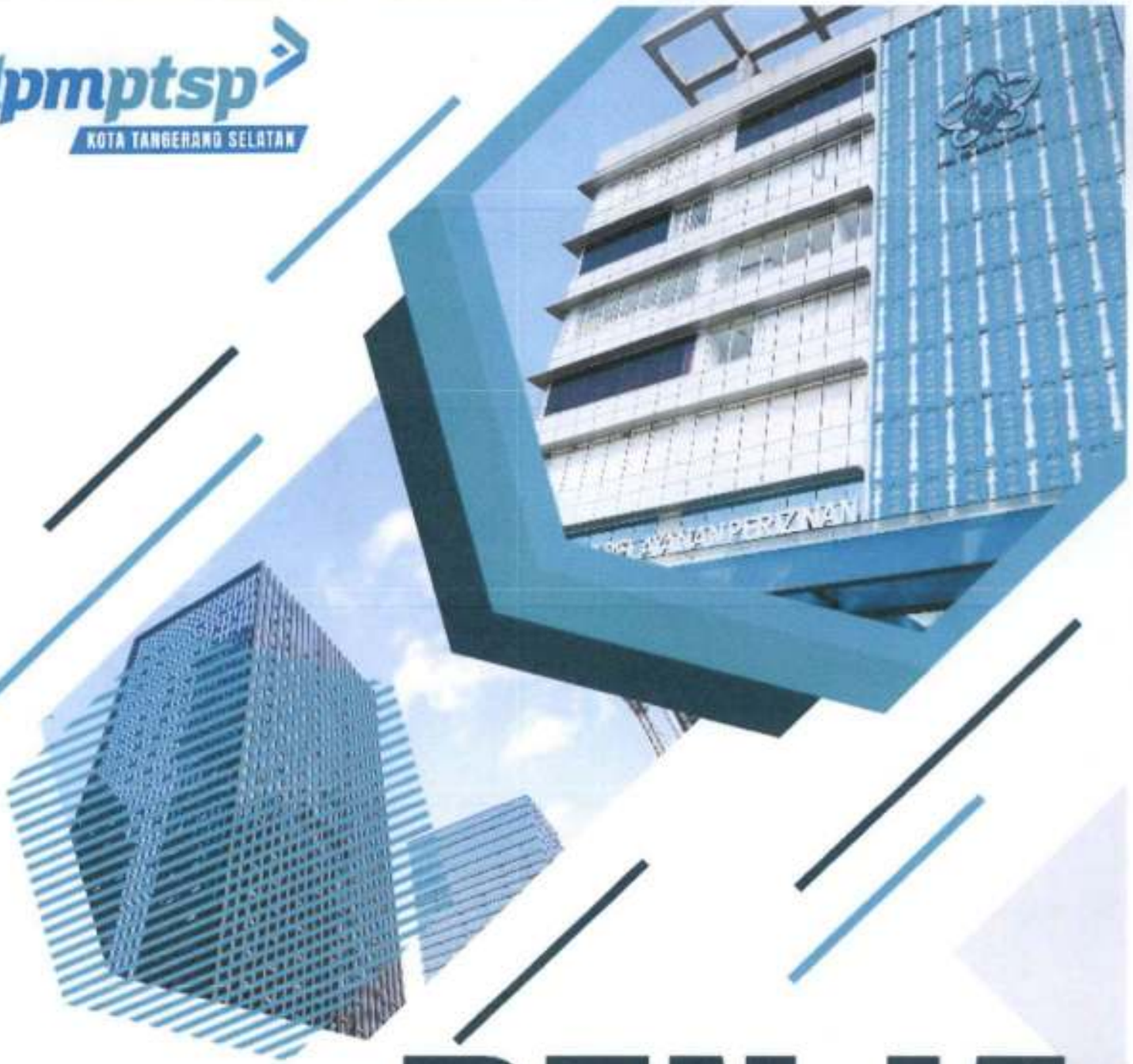
dpmptsp
KOTA TANGERANG SELATAN



RENJA
TAHUN 2025

PEMERINTAH KOTA
TANGERANG SELATAN

BerAKHLAK

bangga melayani bangsa

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami Panjatkan Kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan. Rencana Kerja yang disusun oleh DPMPTSP Kota Tangerang Selatan merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja DPMPTSP Kota Tangerang Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada Tahun 2025.

Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Renstra DPMPTSP Kota Tangerang Selatan serta disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja DPMPTSP Kota Tangerang Selatan diharapkan dapat memberikan arahan sekaligus menjadi acuan bagi kinerja DPMPTSP dalam mencapai tujuan organisasi sesuai dengan VISI, MISI dan, arah kebijakan yang telah ditetapkan, sehingga seluruh daya dan upaya yang akan dilakukan dapat berjalan secara sinergis dengan perencanaan program kerja Tahunan Kota Tangerang Selatan dalam satu pola sikap dan tindak.

Kepada semua pihak yang telah mengerahkan tenaga dan pikirannya dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) DPMPTSP Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2025 ini, kami sampaikan ucapan terima kasih.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan memberkahi langkah serta upaya kita dalam meningkatkan kinerja guna mewujudkan "Kota Tangerang Selatan Cerdas, Modern dan Religius".

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ..... XVIII.i

Daftar Isi ..... XVIII.ii

Daftar Tabel ..... XVIII.iii

BAB I PENDAHULUAN XVIII.1

1.1 Latar Belakang XVIII.1

1.2 Landasan Hukum XVIII.2

1.3 Maksud dan Tujuan XVIII.5

1.4 Sistematika Penulisan XVIII.5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DPMPTSP KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN LALU XVIII.7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Tahun Lalu dan Capaian Renstra XVIII.7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kota Tangerang Selatan XVIII.20

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPMPTSP XVIII.23

2.4 Review terhadap Rancangan RKPD XVIII.41

2.5 Penelaahan usulan Progran dan Kegiatan Masyarakat . XVIII.55

BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENJA DPMPTSP KOTA TANGERANG SELATAN XVIII.57

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional XVIII.57

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP XVIII.60

3.3 Program dan Kegiatan DPMPTSP Tahun 2025 ..... XVIII.62

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP KOTA TANGERANG SELATAN XVIII.76

BAB V PENUTUP XVIII.100

DAFTAR TABEL

2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPMPTSP XVIII.8

2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu XVIII.22

2.3 Cascading DPMPTPS Tahun 2025 ..... XVIII.28

2.4 Review terhadap Rancangan RKPD XVIII.41

2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan .. XVIII.56

3.1 Telaahan Singkronisasi Prioritas Nasional..... XVIII.58

3.2 Perumusan Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP..... XVIII.61

3.3 Indentifikasi Permasalahan untuk Penentuanan Program Prioritas XVIII.63

3.4 Pohon Kinerja DPMPTSP Tahun 2025 ..... XVIII.64

3.5 Rumusan Program dan Kegiatan Dan Perkiraan Maju Tahun 2026 ..... XVIII.69

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025 ..... XVIII.78

4.2 Rencana Kerja dan Pendanaan Pencapaian Fokus Pembangunan Kepala Daerah Daerah Tahun 2025..... XVIII.95

4.3 Rencana Kerja Dan Pendanaan Penerapan SPM Tahun 2025 ..... XVIII.98

4.4 Rencana Kerja Dan Pendanaan Program Percepatan Penurunan Stunting XVIII.98

4.5 Rencana Kerja Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem..... XVIII.99

4.6 Rencana Kerja dan Pendanaan Program Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025..... XVIII.99

4.7 Rencana Belanja Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Tahun 2025 ..... XVIII.99

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Akhir Satuan Kerja Perangkat Daerah (RANHIR SKPD) merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Renja SKPD merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) SKPD sehingga penyusunan Renja SKPD berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah.

Dengan memperhatikan aturan yang berlaku, penyusunan RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 dilaksanakan melalui pendekatan teknokratif, partisipatif, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Sesuai pendekatan dimaksud, maka RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 ini merupakan manifestasi dari berbagai pikiran segenap pemangku kepentingan. Proses penyusunan RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 dilakukan melalui Forum Perangkat Daerah, koordinasi antar bidang dan stakeholder yang terkait. RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 ini sendiri telah memperhatikan keterkaitan dan sejalan dengan Rancangan Perubahan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 - 2026, Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 dan Rencana Kerja kementerian/lembaga terkait yang nantinya akan dijabarkan dalam rencana kinerja jangka pendek urusan penanaman modal tahun 2025.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 merupakan Rencana Kerja Tahunan sebagai penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2025. Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Proses Penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, agar didalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

Sebagai dokumen rencana tahunan, RENJA DPMPTSP Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RENJA SKPD merupakan dokumen yang secara substansial menjabarkan visi, misi, dan program SKPD seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis SKPD dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
2. RENJA SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA–PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) pada tahun 2025;
3. RENJA SKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan SKPD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (LNRI Tahun 2004 Nomor 104, TLNRI Tahun 2004 Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 (LNRI Tahun 2007 Nomor 33, TLNRI Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LNRI Tahun 2008 Nomor 61, TLNRI Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (LNRI Tahun 2008 Nomor 188, TLNRI Nomor 4935);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (LNRI Tahun 2000 Nomor 112, TLNRI Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (LNRI Tahun 2020 Nomor 245, TLNRI Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (LNRI Tahun 2004 Nomor 45, TLNRI Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 139, TLNRI Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (LNRI Tahun 2006 Nomor 25, TLNRI Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (LNRI Tahun 2006 Nomor 96, TLNRI Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82, TLNRI Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 21, TLNRI Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun

2016 tentang Perangkat Daerah (LNRI Tahun 2019 Nomor 187, TLNRI Nomor 6402);

15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2031, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2031;
21. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tangerang Selatan 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0112);
22. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 – 2026;
23. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Tangerang

Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

24. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Pintu;
25. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 44 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
26. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 – 2026;
27. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 29 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2025 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rencana Kerja Anggarann (RKA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan Tahun 2025.

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja adalah :

1. Sebagai acuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan dalam mengoperasionalkan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025.
2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan.
3. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan.
4. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan yang perlu disampaikan kepada pemerintah daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sistematika penyusunan RENJA DPMPTSP Kota Tangerang Selatan tahun 2025 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI DPMPTSP KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN LALU
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Kota Tangerang Selatan Tahun Lalu dan Capaian Renstra DPMPTSP DPMPTSP Kota Tangerang Selatan
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kota Tangerang Selatan
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Tangerang Selatan
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DPMPTSP KOTA TANGERANG SELATAN
- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja DPMPTSP Kota Tangerang Selatan
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP KOTA TANGERANG SELATAN

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DPMPTSP KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Kota Tangerang Selatan Tahun Lalu dan Capaian Renstra DPMPTSP Kota Tangerang Selatan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan pada Tahun Lalu menyelenggarakan Urusan pemerintahan bidang penanaman modal. Setiap program selanjutnya disusun dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung. Program dan kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka menunaikan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai organisasi perangkat daerah Kota Tangerang Selatan.

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra, setiap program dan kegiatan dibebani suatu indikator kinerja. Program dibebani indikator kinerja yang bersifat hasil (*outcome*) sedangkan kegiatan dibebani indikator kinerja yang bersifat keluaran (*output*). Target capaian kinerja ditetapkan dalam renstra untuk lima tahun dan dijabarkan dalam target kinerja tahunan dalam renja.

Hasil pengukuran capaian kinerja tiap tahun atas target kinerja yang telah ditetapkan dalam renja dan renstra disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tabel 2.1 menyajikan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan dan pencapaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan sampai dengan tahun 2026.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPMPTSP Kota Tangerang Selatan dan Pencapaian Renstra DPMPTSP Kota Tangerang Selatan s.d. Tahun 2024

Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024 Semester I	
									Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					Tujuan Meningkatkan Proporsi Investasi Terhadap PDRB		**45%**							
					Sasaran Meningkatnya Nilai Investasi	**Nilai investasi**	**5,39 Triliun (Rupiah)**	**4,65 Triliun (Rupiah)**	**4,42 Triliun (Rupiah)**	**7,44 Triliun (Rupiah)**	**168,32**	**4,9 Triliun (Rupiah)**	**1,7 Triliun (Rupiah)**	**38,77**
					Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perizinan dan Non perizinan	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**90,50 Nilai**	**88,59 Nilai**	**89,00 Nilai**	**89,05 Nilai**	**100,05**	**89,50 Nilai**	**0**	**0,00**
2					**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**									
2	**18**				**Bidang Urusan Penanaman Modal**									
2	**18**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah**	**60**	**53,91**	**56**	**N/A tidak ada penilaian LKE PMB digantikan dengan nilai RB Tematik**	**0,00**	**58**	**N/A tidak ada penilaian LKE PMB digantikan dengan nilai RB Tematik**	**0,00**
						Predikat SAKIP	**BB**	**A**	**BB**	**A**	**100,00**	**A**	**A**	**100,00**
2	**18**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai AKIP**	**84,4**	**85,39**	**84,25**	**87,01**	**103,28**	**84,35**	**89,25**	**105,81**
2	18	1	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Doc	3 Doc	6 Doc	6 Doc	100,00	8 Doc	8 Doc	100,00
2	18	1	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Doc	3 Doc	2 Doc	2 Doc	100,00	1 Doc	0	0,00
2	18	1	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan	2 Doc	1 Doc	2 Doc	2 Doc	100,00	1 Doc	0	0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024 Semester I	
									Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					Perubahan RKA-SKPD	RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
2	18	1	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Doc	1 Doc	1 Doc	1 Doc	100,00	1 Doc	0	0,00
2	18	1	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Doc	2 Doc	2 Doc	2 Doc	100,00	1 Doc	1	100,00
2	18	1	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Lap	11 Lap	10 Lap	10 Lap	100,00	11 Lap	5 Lap	45,45
2	18	1	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Lap	6 Lap	6 Lap	6 Lap	100,00	8 Lap	2 Lap	25,00
2	**18**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Presentase Capaian Realisasi Keuangan pertahun**	**94,00%**	**95,05%**	**91%**	**96,14**	**105,65**	**92%**	**52,49%**	**57,05**
2	18	1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 Org	60 Org	59 Org	59 Org	100,00	56 Org	0	0,00
2	18	1	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Doc	1 Doc	1 Doc	1 Doc	100,00	1 Doc	0	0,00
2	18	1	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	10 Doc	10 Doc	10 Doc	10 Doc	100,00	1 Doc	0	0,00
2	18	1	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Doc	1 Doc	1 Doc	1 Doc	100,00	1 Doc	0	0,00
2	18	1	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	100,00	1 Lap	0	0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024 Semester I	
									Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
						Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
2	18	1	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Doc	2 Doc	2 Doc	2 Doc	100,00	1 Doc	0	0,00
2	18	1	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6 Lap	12 Lap	6 Lap	6 Lap	100,00	12 Lap	6 Lap	50,00
2	18	1	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Doc	1 Doc	1 Doc	1 Doc	100,00	1 Doc	0	0,00
2	**18**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Presentase Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100,00**	**100%**	0	**0,00**
2	18	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	100 Org	45 Org	45 Org	100,00	60 Org	0	0,00
2	18	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	60 Org	35 Org	35 Org	100,00	60 Org	0	0,00
2	**18**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100,00**	**100%**	50,00	**0,00**
2	18	1	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100,00	3 Paket	0	0,00
2	18	1	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	4 Paket	6 Paket	6 Paket	100,00	1 Paket	1 Paket	100,00
2	18	1	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	82 Paket	3 Paket	3 Paket	100,00	3 Paket	1 Paket	33,33

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024 Semester I	
									Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	18	1	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	6 Paket	100,00	6 Paket	4 Paket	66,67
2	18	1	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Doc	4 Doc	3 Doc	3 Doc	100,00	3 Doc	1 Doc	33,33
2	18	1	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	20 Lap	1 Lap	1 Lap	100,00	1 Lap	0	0,00
2	**18**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1 Paket**	**1 Paket**	-	-	-	-	-	-
2	18	1	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	-	-	-	-	-	-
2	**18**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Waktu Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**100,00**	**1 Tahun**	**0**	**0,00**
2	18	1	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	100,00	1 Lap	0	0,00
2	18	1	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	100,00	1 Lap	0	0,00
2	18	1	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	100,00	1 Lap	0	0,00
2	18	1	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	100,00	1 Lap	0	0,00
2	**18**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**Waktu Pelaksanaan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100,00**	**12 Bulan**	**6 Bulan**	**50,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024 Semester I	
									Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								
2	18	1	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100,00	2 Unit	0	0,00
2	18	1	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	40 Unit	40 Unit	38 Unit	95,00	38 Unit	0	0,00
2	18	1	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	197 Unit	11 Unit	11 Unit	100,00	10 Unit	3 Unit	30,00
2	18	1	2.08	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasai	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100,00	1 Unit	0	0,00
2	**18**	**2**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Jumlah Investor**	**1860 Investor**	**2695 Investor**	**2093 Investor**	**8791 Investor**	**420,02**	**1785 Investor**	**2908 Investor**	**162,91**
2	**18**	**2**	**2.01**		**Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**1 Doc**	**1 Doc**	**1 Doc**	**1 Doc**	**100,00**	**1 Doc**	**0**	**0,00**
2	18	2	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Doc	1 Doc	1 Doc	1 Doc	100,00	1 Doc	0	0,00
2	18	2	2.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusah di Daerah	1 Doc	-	1 Doc	1 Doc	100,00	0	0	0
2	18	2	2.01	03	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh	Jumlah Kesepakatan	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	0	0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024 Semester I	
									Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					Pemerintah Kabupaten/Kota	Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah						Usaha		
2	**18**	**2**	**2.02**		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Jumlah Laporan Peta Potensi Investasi**	**1 Lap**	**1 Lap**	**1 Lap**	**1 Lap**	**100,00**	**1 Lap**	**0**	**0,00**
2	18	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Doc		1 Doc	1 Doc	100,00	1 Doc	0	0,00
2	18	2	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Doc	1 Doc	1 Doc	1 Doc	100,00	0	0	0,00
2	18	2	2.02	04	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota						1 Doc	1 Doc	100,00
2	**18**	**3**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Presentase peningkatan calon investor yang menerima informasi potensi investasi daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**150%**	**150,00**	**100%**	**79,00%**	**79,00**
2	**18**	**3**	**2.01**		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kegiatan pameran penanaman modal**	**3 Kali**	**2 Kali**	**3 Kali**	**3 Kali**	**100,00**	**3 Kali**	**2 Kaali**	66,67
2	18	3	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Doc		1 Doc	1 Doc	100,00	0	0	0,00
2	18	3	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Doc	1 Doc	1 Doc	1 Doc	100,00	1 Doc	0	0,00
2	18	3	2.01	03	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	-	-	-	-	-	1 Doc	1 Doc	100,00
2	**18**	**4**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Presentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan sesuai SOP**	**90%**	**75,08%**	**75%**	**75,54%**	**100,72**	**85%**	**73,47%**	**86,44**
2	**18**	**4**	**2.01**		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu**	**Presentase Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100,00**	**100%**	**50%**	**50,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024 Semester I	
									Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	**Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**								
2	18	4	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	6400 Pelaku Usaha	15002 Pelaku Usaha	6100 Pelaku Usaha	15863 Pelaku Usaha	260,05	0	0	0,00
2	18	4	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	5400 Kegiatan Usaha	8262 Kegiatan Usaha	5100	6953	136,33	0	0	0,00
2	18	4	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	260 Org	160 Org	150 Org	311 Org	207,33	0	0	0,00
2	18	4	2.01	04	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	-	-	-	-	-	6200 Pelaku Usaha	3631 Pelaku Usaha	58,56
2	18	4	2.01	05	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	-	-	-	-	-	280 Org	273 Org	97,50

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024 Semester I	
									Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	18	4	2.01	06	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	-	-	-	-	-	5200 Kegiatan Usaha	4671 Kegiatan Usaha	89,83
2	**18**	**5**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Presentase pengendalian terhadap penanaman modal**	**100%**	**21,44%**	**40%**	**57,33%**	**143,33**	**80%**	**65,22%**	**81,53**
2	**18**	**5**	**2.01**		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Laporan Kegiatan Monev Penanaman Modal**	**4 Lap**	**4 Lap**	**4 Lap**	**4 Lap**	**100,00**	**4 Lap**	**2 Lap**	**50,00**
2	18	5	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	100 Pelaku Usaha	258 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	222 Pelaku Usaha	222,00	0	0	0,00
2	18	5	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	28 Kegiatan Usaha	193 Kegiatan Usaha	19 Kegiatan Usaha	305 Kegiatan Usaha	1605,26	0	0	0,00
2	18	5	2.01	04	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	-	-	-	-	-	11 Kegiatan Usaha	150 Kegiatan Usaha	1363,64
2	18	5	2.01	05	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	-	-	-	-	-	301 Pelaku Usaha	167 Pelaku Usaha	55,48
2	18	5	2.01	06	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi	-	-	-	-	-	19 Kegiatan Usaha	95 Kegiatan Usaha	500,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024 Semester I	
									Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
						Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha								
2	**18**	**6**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Presentase potensi investasi yang terintegrasi dalam sistem informasi penanaman modal**	**100%**	**18,18%**	**30%**	**36,36%**	**121,20**	**76%**	**36,36%**	**47,84**
2	**18**	**6**	**2.01**		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah media informasi dan data perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara Elektronik**	**1 Jenis**	**1 Jenis**	**1 Jenis**	**1 Jenis**	**100,00**	**1 Jenis**	**0**	**0,00**
2	18	6	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Data dan Informasi	1 Data dan Informasi	1 Data dan Informasi	1 Data dan Informasi	100,00	0	0	0,00
2	18	6	2.01	02	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	-	-	-	-	-	1 Data dan Informasi	0	0,00

Evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan pada table 2.1 di atas di jelaskan bahwa program dan kegiatan didasari oleh Peraturan Kementrian dalam Negeri No 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenkaltur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dan pada tahun 2023 dan 2024 program dan kegiatan yang didasari oleh Kepmendagri Nomor 050-5889.

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Target output Program Peningkatan Penanaman Modal adalah Jumlah Investor dengan target sebesar 2093 Investor. Capaian kinerja Jumlah Investor pada tahun 2023 melebihi target yakni sebesar 8791 Investor atau tercapai sebesar 420,02%. Untuk dapat melaksanakan program ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.154.380.980,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.132.423.000,-, yang terdistribusi kedalam 2 kegiatan sebagai berikut.

a. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

Dari dua kegiatan pada Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal seluruhnya telah tercapai 100%.

b. Program Promosi Penanaman Modal

Target output Program Promosi Penanaman Modal adalah Presentase peningkatan calon investor yang menerima informasi potensi investasi daerah dengan target sebesar 100%. Capaian kinerja Presentase peningkatan calon investor yang menerima informasi potensi investasi daerah pada tahun 2023 mencapai target yakni sebesar 150%. Untuk dapat melaksanakan program ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.547.961.400,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.533.063.932,-, yang terdistribusi kedalam 1 kegiatan sebagai berikut .

a. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Dari kegiatan tersebut Pencapaian indikatornya mencapai target yang pada tahun 2023 ditargetkan 3 kegiatan pameran promosi penanaman modal dan terealisasi 3 kegiatan pameran promosi penanaman modal atau tercapai 100%. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mulai memfokuskan strategi promosi melalui pemanfaatan Teknologi Informasi (online). Adapun dampak dari tidak tercapainya kegiatan ini serta perubahan strategi promosi penanaman modal melalui online adalah:

1. Jumlah kegiatan promosi penanaman modal melalui kegiatan pameran (Offline) di tahun-tahun kedepan akan berkurang sehingga lebih efektif dan efisien dari segi anggaran.

2. Kegiatan promosi secara online akan terus ditingkatkan sehingga diperlukan dukungan anggaran pada kegiatan:

   a. Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik (MPP) yang didalamnya memuat pengumpulan bahan-bahan promosi secara online pada Website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

   b. Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Pelayanan Publik yang didalamnya memuat kebutuhan pengembangan sistem Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta kebutuhan server dan storagenya.

3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

   Target output Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal adalah Presentase Pengendalian terhadap Penanaman Modal dengan target sebesar 40%. Capaian kinerja Presentase Pengendalian terhadap Penanaman Modal pada tahun 2023 mencapai target yakni sebesar 57,33%. Untuk dapat melaksanakan program ini telah dialokasikan anggaran bersumber dari Dana Anggaran Khusus (DAK) sebesar Rp.281.700.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.277.595.800,-, yang terdistribusi kedalam 1 kegiatan sebagai berikut .

   a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

   Dari kegiatan tersebut Pencapaian indikatornya yang ditargetkan pada tahun 2023 ditargetkan 4 Laporan Kegiatan Monev Penanaman Modal dan terealisasi 4 Laporan Kegiatan Monev Penanaman Modal atau tercapai 100%.

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

   Target output Program Pelayanan Penanaman Modal adalah Presentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan sesuai SOP dengan target sebesar 75%. Capaian kinerja Presentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan sesuai SOP pada tahun 2023 mencapai target yakni sebesar 75,54%, penarikan data dari simponie. Untuk dapat melaksanakan program ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.374.792.110,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.1.278.119.570,-, yang terdistribusi kedalam 1 kegiatan sebagai berikut .

a. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.

Dari kegiatan tersebut Pencapaian indikatornya yang ditargetkan pada tahun 2023 ditargetkan Presentase Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota dan terealisasi atau tercapai 100%.

5. Program Pengelolaan Data dan Sitem Informasi Penanaman Modal

Target output Program Pengelolaan Data dan Sitem Informasi Penanaman Modal adalah Presentase potensi investasi yang terintegrasi dalam sistem informasi penanaman modal target sebesar 30%. Capaian kinerja Presentase potensi investasi yang terintegrasi dalam sistem informasi penanaman modal pada tahun 2023 mencapai target yakni sebesar 36,36%. Untuk dapat melaksanakan program ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.64.417.360,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.36.530.760,-, yang terdistribusi kedalam 1 kegiatan sebagai berikut .

b. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.

Dari kegiatan tersebut Pencapaian indikatornya yang ditargetkan pada tahun 2023 ditargetkan 1 jenis Jumlah media informasi dan data perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara Elektronik dan terealisasi 1 jenis atau tercapai 100%.

6. Program Penunjang Urusan Daerah

Target predikat nilai SAKIP grade BB, realisasi pada tahun 2023 mendapatkan grade A, dalam nilai Akip OPD Dpmptsp mendapatkan nilai sebesar 85,39 dan Indikator Nilai PM RB perangkat daerah dari target 56 tidak terealisasi karena tidak ada penilaian LKE PMB digantikan dengan nilai RB Tematik. Untuk dapat melaksanakan program ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.28.941.718.027,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.27.897.674.733,- yang terdistribusi kedalam 7 kegiatan sebagai berikut .

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
b. Kegiatan Administrasi Keuangan
c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dari kegiatan tersebut Pencapaian indikatornya yang ditargetkan pada tahun 2023 tercapai 100%.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kota Tangerang Selatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan, memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, dalam melaksanakan tugas DPMPTSP juga menyelenggarakan fungsi fungsi yang harus dilaksanakan adalah melakukan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal, Pengaduan dan Peningkatan Layanan, serta Pengelolaan Data dan Informasi. Sekretaris dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan administrative dan teknis yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, dan umum serta mengoordinasikan pelaksanaan administrasi lingkup Dinas. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut maka penjabaran penjelasan ringkas tentang capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan pada renja tahun sebelumnya.

Indikator kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan terletak pada sasaran pembangunan dalam renstra. Indikator kinerja pelayanan merupakan indikator kinerja yang bersifat hasil (*outcome*) dan menggambarkan indikator kinerja program-program yang dilaksanakan dalam mencapai sasaran pembangunan dimaksud. Indikator kinerja pelayanan ini dapat berupa indikator kinerja kunci (IKK) maupun indikator yang dikreasikan guna mengukur tingkat layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan.

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai

tujuan, sasaran dan indikator kinerjanya akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi.

- Indikator Kinerja Utama (IKU) Eselon II adalah sebagai berikut :

  1. Meningkatnya Nilai Investasi Indikator Kinerja Utama ***"Nilai Investasi"***
  2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perizinan dan Non Perizinan Indikator Kinerja Utama ***"Indeks Kepuasan Masyarakat"***.

- Indikator Kinerja Individu (IKI) Eselon III adalah sebagai berikut :

  1. Jumlah Investor
  2. Presentase peningkatan calon investor yang menerima informasi potensi investasi daerah
  3. Presentase Pengendalian terhadap Penanaman Modal
  4. Presentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan sesuai SOP
  5. Presentase Potensi Investasi Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Penanaman Modal
  6. Nilai PM RB perangkat daerah
  7. Predikat SAKIP.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kota Tangerang Selatan

No.	Indikator	IKK/ Indikator Kinerja Urusan	Target IKU Daerah / Iku Urusan Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
			2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14)	(15)
1	Nilai investasi tahunan (Triliun Rupiah)		4,42 T (Rp)	4,66 T (Rp)	4,90 T (Rp)	8,4 - 8,7 T (Rp)	5,39 T (Rp)	5,67 T (Rp)	4,65 T (Rp)	7,44 T (Rp)	4,90 T (Rp)	8,4 - 8,7 T (Rp)	Mengacu dalam Dokumen RPJMD 2021-2026, RKPD Tahun 2025
2		Nilai Investasi	4,42 T (Rp)	4,66 T (Rp)	8,7 T (Rp)	5,14 T (Rp)	5,39 T (Rp)	5,67 T (Rp)	4,65 T (Rp)	7,44 T (Rp)	4,90 T (Rp)	8,4 - 8,7 T (Rp)	Mengacu dalam Dokumen Renstra 2021-2026, RKPD Tahun 2025
3		Indeks Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Perizinan)	88,5	89,00	89,50	90,00	90,50	88,41	88,59	89,05	89,50	90,00	

Pada table diatas merupakan pencapaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan dimana terdapat 2 indikator yang tertuang dalam Rencana Strategis tahun 2021-2026.

Indikator Nilai investasi adalah indikator yang menjadi urusan penanaman modal dimana setiap tahunnya realisasi selalu melebihi dari target yang dimana Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal dalam Negeri adalah satuan targetnya yang indikatornya berupa nilai investasi atau uang rupiah.

Indikator selanjutnya Indeks Kepuasan Masyarakat telah mencapai target satuannya adalah nilai dari hasil survey masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Tangerang Selatan

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan tidak lepas dari isu- isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan pemerintah untuk bekerjanya fungsi-fungsi yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan Masyarakat. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan penanaman modal meliputi:

1. Belum optimalnya upaya ekstentifikasi potensi-potensi investasi yang bernilai tambah tinggi dan dapat menyerap tenaga kerja;
2. Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non perizinan.

Isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi. Isu strategis yang telah di identifikasi meliputi:

a. Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi investor, meningkatkan daya saing, kemitraan dan menciptakan persaingan usaha yang sehat;
b. Mewujudkan Kota Tangerang Selatan sebagai daerah tujuan investasi yang menarik, yang teritegrasi dengan pelayanan dan perizinan terpadu satu pintu secara prima, efisien, efektif dan akuntabel, sehingga dapat menarik minat calon investor;
c. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.

Salah satu tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu melakukan pelayanan publik dibidang pelayanan perizinan baik di level provinsi maupun diKabupaten/Kota. Dalam rangka peningkatan sistem pelayanan perizinan Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektornik melalui penerapan Aplikasi *Online Single Submission* (OSS). Penerapan sistem

OSS diharapkan dapat mempercepat dan menyederhanakan proses pelayanan perizinan dengan mengurangi proses birokrasi sehingga mempermudah para pelaku usaha untuk mendapatkan izin berusaha di Indonesia.

Digitalisasi sistem pelayanan perizinan melalui penerapan OSS selanjutnya diharapkan mampu meningkatkan iklim investasi di Indonesia yang pada akhirnya dapat mendongkrak daya saing Indonesia. Daya saing suatu daerah merupakan hal yang sangat penting bagi investor untuk menentukan keputusan berinvestasi. Investor cenderung akan memilih daerah yang lingkungan bisnis dengan kebijakan yang ramah, sehingga menjadikan investor menanam investasinya dengan risiko yang dapat dikelola dan terkontrol. Sehingga pada akhirnya dengan perbaikan sistem perizinan diharapkan dapat meningkatkan realisasi investasi di Indonesia.

Namun dalam pelaksanaannya sampai saat ini dirasa masih belum cukup untuk mewujudkan realisasi penanaman modal sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut karena terdapat beberapa kendala yang dihadapi baik oleh pelaku usaha maupun oleh pemerintah daerah terkait sistem OSS baik dalam regulasi maupun sistemnya.

Adapun permasalahan dan isu-isu strategis yang perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dalam penyelenggaraan perizinan antara lain:

1. Pemerintah perlu segera menerbitkan kebijakan terkait dengan kelembagaan PTSP di daerah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dalam rangka debirokratisasi pelayanan perizinan. Hal ini karena adanya beberapa NSPK sebagai peraturan pelaksanaan PP No. 24 Tahun 2018 dalam mekanismenya pelayanannya tidak mewajibkan prosesnya melalui Dinas PMPTSP tetapi langsung melalui perangkat daerah teknis;
2. Mendorong kejelasan, kepastian dan harmonisasi kebijakan terkait penyelenggaraan pelayanan perizinan melalui sistem OSS, baik regulasi maupun sistemnya secara konsisten tidak selalu berubah-ubah;
3. Mendorong pemerintah dalam hal sinergitas antara Kementerian/Lembaga dengan daerah dalam mewujudkan deregulasi pelayanan perizinan baik berupa NSPK ataupun rencana penerbitan omnibuslaw yang sesuai dengan maksud dan tujuan diterbitkannya PP No 24 Tahun 2018 dengan melibatkan pemerintah daerah.
4. Meningkatkan optimalisasi dan singkronisasi peran perencanaan dan pengembangan potensi penanaman modal dari BKPM terhadap daerah

dalam bentuk progtam dekonsentrasi yang nyata sehingga potensi dan realisasi penanaman modal di daerah dapat optimalkan dengan baik.

5. Dengan terbitnya Undang Undang Cipta Kerja beserta turunannya (PP 5 dan PP 6 tahun 2021) masih banyak peraturan yang belum menyesuaiakan dengan peraturan tersebut, baik perubahan atau pencabutan regulasi daerah yang sudah tidak sesuai dengan pelayanan perizinan saat ini;
6. Belum adanya kebijakan tentang insentif bidang penanaman modal di Kota Tangerang Selatan yang merupakan salah satu faktor untuk dapat meningkatkan kerjasama investasi di Kota Tangerang Selatan;
7. Belum sempurnanya aplkasi OSS RBA, apabila terkendala permasalahan dengan pemohon belum bisa menyelesaikan atau memberikan solusi sehingga memperlambat pelayanan dan penyelesaian masalah;
8. Belum terjalin koordinasi yang baik antara pengelola hak akses (DPMPTSP) dengan pemegang hak akses turunan dalam hal ini perangkat daerah (Dinas teknis) sehingga sering terjadi miss dalam pernerbitan perizinan OSS RBA by system;
9. Belum semua pelaku usaha menyadari kewajiban dalam Melaporkan kegiatan usahanya dalam bentuk Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
10. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) baik dalam jumlah personil maupun kompetensi yang dibutuhkan;
11. Sarana dan Prasarana di DPMPTSP masih belum memadahi untuk proses pelayanan sehingga sering menghambat kinerja pelayanan;
12. Rendahnya minat Investor untuk melakukan usaha di Kota Tangerang Selatan;
13. Masih kurangnya pengetahuan pelaku usaha dengan modal di atas 1 Milyar untuk melakukan kewajiban Pelaporan LKPM, dan
14. Belum adanya kebijakan penguatan kelembagaan DPMPTSP sebagai koordinator untuk menerbitkan regulasi dan kebijakan dalam penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik (MPP).

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Secara umum kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan terhadap target yang tercantum dalam dokumen perencanaan, baik Renja Tahun 2025 maupun Renstra Tahun 2021-2026 sudah Terakomodir. Sebagian besar target yang telah ditetapkan dapat tercapai, bahkan terlampaui.

Adapun tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi bidang penanaman modal diantaranya :

Tantangan :

1) Meningkatkan kualitas perencanaan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing Kota Tangerang Selatan.
2) Meningkatkan citra Kota Tangerang Selatan yang memiliki nilai strategis penanaman modal yang ramah, prospektif dan kondusif serta menjanjikan bagi para investor baik dalam maupun luar negeri.
3) Meningkatkan kerjasama penanaman modal pemerintah daerah dengan badan usaha sebagai langkah percepatan investasi di Kota Tangerang Selatan.
4) Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal yang berorientasi pada kemudahan dan kecepatan pelayanan yang berdampak pada iklim investasi di Kota Tangerang Selatan.
5) Mendorong terciptanya efektifitas dan efisiensi pelayanan dan realisasi investasi dengan sederhana dan mudah melalui program inovasi.
6) Meningkatan realisasi dan diversifikasi penanaman modal melalui proyek-proyek investasi untuk meningkatkan percepatan ekonomi.
7) Tersedianya data dan informasi peluang investasi multi sektor yang menjadi komoditas unggulan Kota Tangerang Selatan.

Peluang :

1) Implementasi UU No. 11 th 2020 tentang cipta lapangan kerja.
2) Implementasi sistem OSS RBA yang mulai diterapkan.
3) Koordinasi dan komunikasi dengan BKPM/Kementerian Investasi dan DPMPTSP se-Banten.
4) Kemudahan dalam pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mempromosikan potensi investasi.

5) Kebijakan penanaman modal yang mendukung iklim investasi Kota Tangerang Selatan.

6) Merupakan daerah ekonomi strategis

7) Mendorong tumbuh dan berkembangnya ekonomi syariah

8) Mengoptimalkan Mall Pelayanan Publik dalam rangka salah satu langkah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang Mendukung Investasi.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan DPMPTSP Kota Tangerang Selatan, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan DPMPTSP Kota Tangerang Selatan sebagai berikut:

a. Pengkoordinasian Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang Terjabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Tangerang Selatan

b. Pencapaian visi dan misi Walikota dijabarkan dalam serangkaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Tangerang Selatan beserta indikator dan targetnya. DPMPTSP sebagai salah satu SKPD yang memiliki beberapa fungsi dimana salah satunya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mendongrak nilai investasi sesuai dengan visi dan misi Walikota. Karena itu DPMPTSP perlu memiliki komitmen yang kuat dalam melakukan upaya - upaya pengkoordinasian pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Walikota sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026.

c. Menggali sektor potensi yang ada di Kota Tangerang Selatan yang mempunyai nilai jual untuk menarik investor untuk berinvestasi.

Tabel 2.3
Cascading DPMPTSP Kota Tangerang Selatan Tahun 2025

Sasaran Strategis Walikota	Indikator	Sasaran Strategis Kepala OPD	Indikator	Program	Sasaran Program/ Bidang	Indikator Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Aktifitas	Pengampu
Meningkatnya Investasi	Nilai Investasi Tahunan	Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai Investasi	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Meningkatnya Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Investor	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	Terlaksananya Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Terlaksananya Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah /Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	FGD Perwal Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, Sosialisasi Perwal Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Pokja PM
										Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten /Kota	Terfasilitasinya Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	FGD Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, Sosialisasi Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Pokja PM
							Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten	Tersedianya Peta Potensi Investasi Kabupaten	Jumlah Laporan Peta Potensi Investasi	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal	Terlaksananya Penyusunan Rencana Umum	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana	Penyusunan Draft Raperwal RUPM	Pokja PM

Sasaran Strategis Walikota	Indikator	Sasaran Strategis Kepala OPD	Indikator	Program	Sasaran Program/ Bidang	Indikator Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Aktifitas	Pengampu
							/Kota	/Kota		Daerah Kabupaten /Kota	Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/K ota		
										Terlaksana nya Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota	Tersedianya Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/K ota	Kajian Peta potensi Investasi Sektor Properti & Perdagangan	Pokja PM
				Promosi Penanama n Modal	Meningkatnya Promosi Penanaman Modal	Presentase peningkata n calon investor yang menerima informasi potensi investasi daerah	Penyelengg araan Promosi Penanama n Modal yang Menjadi Kewenanga n Daerah Kabupaten / Kota	Terselengg aranya Promosi Penanama n Modal yang Menjadi Kewenanga n Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Kegiatan pameran penanama n modal	Pelaksanaa n Kegiatan Promosi Penanama n Modal Daerah Kabupaten /Kota	Terlaksanya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/K ota	Paneran Nasional, APEKSI 2025, Launching Apeksi 2025, Rapat persiapan Pameran, Temu Investor, Invesment Award	Pokja PM
										Penyusuna n Strategi Promosi Penanama n Modal Kewenanga n Kabupaten / Kota	Tersusunnya Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Raft Raperwal Promosi Daerah, Coffe Morning	Pokja PM
				Pengendal ian Pelaksana an Penanama n Modal	Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Presentase Pengendali an terhadap Penanama n Modal	Pengendali an Pelaksanaa n Penanama n Modal yang Menjadi Kewenanga n Daerah Kabupaten /Kota	Terlaksana nya Pengendali an Pelaksanaa n Penanama n Modal yang Menjadi Kewenanga n Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Monev Penanama n Modal	Penyelesaia n Permasala han dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasi kan Kegiatan Usahanya	Terselesaika nnya Permasalaha n dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasik an Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalaha n dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasika n Kegiatan Usahanya	Identifikasi Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya, Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi	Pokja PM

Sasaran Strategis Walikota	Indikator	Sasaran Strategis Kepala OPD	Indikator	Program	Sasaran Program/ Bidang	Indikator Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Aktifitas	Pengampu
													Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya, Evaluasi Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	
										Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Terlaksananya Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Bimbingan Teknis Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pra PENSI (Pendampingan Pengisian) pelaporan LKPM, PENSI (Pendampingan Pengisian) pelaporan LKPM, Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pokja PM
										Pengawasan Penanaman Modal	Terlaksananya Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi	Rapat Analisa dan verifikasi data, profil dan informasi Pelaku Usaha, Rapat Evaluasi Penilaian kepatuhan pelaksanaan	Pokja Pengawasan

Sasaran Strategis Walikota	Indikator	Sasaran Strategis Kepala OPD	Indikator	Program	Sasaran Program/ Bidang	Indikator Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Aktifitas	Pengampu
												Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Perizinan Berusaha Pelaku Usaha, Inspeksi Lapangan	
		Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan dan Non perizinan	Indeks kepuasan masyarakat	Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya Pelayanan Penanaman Modal	Presentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan sesuai SOP	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Tersedianya Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Presentase Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Workshop Pendampingan Penerbitan NIB Melalui OSS-RBA Kepada Pelaku UMKM, Pelayanan Keliling Penerbitan NIB Tim JOSS (Jemput Online Single Submission), One Day Service SIP, On The Spot OSS Sektor Ketenagakerjaan, On The Spot OSS Sektor Kominfo, On The Spot OSS Sektor Perhubungan, Sosialisasi Stiker QR Code, Fasilitasi Pelayanan Perizinan Sektor Pendidikan, Fasilitasi	Pokja Perizinan 1, Pokja Perizinan 2, Pokja Perizinan 3, Pokja PDPB, Pokja Pengawasan

Sasaran Strategis Walikota	Indikator	Sasaran Strategis Kepala OPD	Indikator	Program	Sasaran Program/ Bidang	Indikator Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Aktifitas	Pengampu
													Pelayanan Perizinan Sektor Pertanian, Perizinan Exspo	
										Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Tersedianya pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	ISO 9001:2015, SKM, Regulasi/ Advokasi, Pengaduan Masyarakat, Pengaduan Masyarakat, Evaluasi Standar Pelayanan dan SOP, Zona Integritas WBK/ WBBM	Pokja Renbang
										Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Tersedianya Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Pemantauan Perizinan Kelompok Kerja I, Pemantauan Perizinan Kelompok Kerja II, Pemantauan Perizinan Kelompok Kerja III, Pemantauan Perizinan Kelompok Kerja PDPB	Pokja Perizinan 1, Pokja Perizinan 2, Pokja Perizinan 3, Pokja PDPB, Pokja Pengawasan
				Pengeloaan Data dan Sistem Informasi	Terpenuhinya Data Dan Sistem Informasi Penanaman	Presentase potensi investasi yang terintegrasi	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan	Jumlah media informasi dan data perizinan	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data	Terlaksanany a Pengolahan, Penyajian dan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem	Fasilitasi Pendampingan Sistem Pemeliharaan	Pokja Renbang

Sasaran Strategis Walikota	Indikator	Sasaran Strategis Kepala OPD	Indikator	Program	Sasaran Program/ Bidang	Indikator Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Aktifitas	Pengampu
				Penanaman Modal	Modal	dalam sistem informasi penanaman modal	dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	dan non perizinan yang terintegrasi secara Elektronik	dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan		
				Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai PM RB perangkat daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersediany a Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LKIP	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Renja 2026, Renstra 2024-2029	Sekretariat
						Predikat SAKIP				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksanany a Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RKA 2025, DRPK, ROK 2025	Sekretariat
										Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksanany a Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	RKA Perubahan 2024, DRPK dan ROK Perubahan 2024	Sekretariat

Sasaran Strategis Walikota	Indikator	Sasaran Strategis Kepala OPD	Indikator	Program	Sasaran Program/ Bidang	Indikator Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Aktiflitas	Pengampu
										Koordinasi dan Penyusuna n DPA-SKPD	Terlaksanany a Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	DPA 2025	Sekretariat
										Koordinasi dan Penyusuna n Perubahan DPA-SKPD	Terlaksanany a Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Pergeseran Anggaran, DPA Perubahan 2024	Sekretariat
										Koordinasi dan Penyusuna n Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksanany a Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Bulanan, Laporan Penyelenggara an Pemerintah Daerah [LPPD] Tahun 2023, LKPJ Tahun 2023, Indikator Kinerja Kunci [IKK] Tahun 2023, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah [LAKIP] Tahun 2023, Daftar Penilaian Resiko, DPR Tahun 2024, SPIP Tahun 2024, Sistem Informasi Pembangunan	Sekretariat

Sasaran Strategis Walikota	Indikator	Sasaran Strategis Kepala OPD	Indikator	Program	Sasaran Program/ Bidang	Indikator Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Aktiflitas	Pengampu
													Daerah [SIPD], Laporan Akhir Tahun	
										Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kegiatan, Monev Rencana Aksi, Monev Rencana Aksi DPR, Monev Renstra, Evaluasi RENJA, Evaluasi SPIP	Sekretariat
										Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terselenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Sekretariat
										Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Terlaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral	Sekretariat
										Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen	Terlaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan	Forum OPD	Sekretariat

Sasaran Strategis Walikota	Indikator	Sasaran Strategis Kepala OPD	Indikator	Program	Sasaran Program/ Bidang	Indikator Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Aktifitas	Pengampu
										Perencanaan Perangkat Daerah	Daerah	Perangkat Daerah		
										Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Tersusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Penyusunan Indikator Kinerja Utama [IKU] dan Penyusunan Penetapan Kinerja [2025], Penyusunan Indikator Kinerja Individu [IKI] Tahun 2025, Penyusunan Pohon Kinerja [CASCADING], Penyusunan Rencana Kerja Tahunan [RKT]	Sekretariat
							Administrasi Keuangan	Terlaksananya Administrasi Keuangan	Presentase Capaian Realisasi Keuangan pertahun	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan	Sekretariat
										Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sekretariat
										Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujuian / Verifikasi Keuangan	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Fasilitasi dan Verifikasi Data Keuangan	Sekretariat

Sasaran Strategis Walikota	Indikator	Sasaran Strategis Kepala OPD	Indikator	Program	Sasaran Program/ Bidang	Indikator Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Aktifitas	Pengampu
										SKPD	SKPD	SKPD		
										Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD	Terlaksanany a Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaa Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Sekretariat
										Koordinasi dan Penyusuna n Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksanany a Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun,Penyus unan Laporan Barang Pakai Habis dan Aset SKPD Akhir Tahun,Penyus unan Laporan Realisasi Keuangan Akhir Tahun	Sekretariat
										Pengelolaa n dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaa n	Tersedianya Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Fasilitasi Persiapan Pemeriksaan Inspektorat,Fa silitasi Penyelesaian TLHP Inspektorat,Fa silitasi Persiapan Pemeriksaan BPK	Sekretariat
										Koordinasi dan Penyusuna n Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semestera n SKPD	Terlaksanany a Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Se mesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan Keuangan Bulanan, Rekonsiliasi SP2D, Rekonsialisasi Barang Pakai Habis dan Aset, Laporan Keuangan Semester, Laporan Pajak	Sekretariat

Sasaran Strategis Walikota	Indikator	Sasaran Strategis Kepala OPD	Indikator	Program	Sasaran Program/ Bidang	Indikator Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Aktifitas	Pengampu
												Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Semester, Laporan Daftar Transaksi Harian Semester	
										Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersususunnya Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Sekretariat
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksanaanya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Bidang Layanan Perizinan	Sekretariat
										Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksanaanya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis	Sekretariat
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Alat Listrik	Sekretariat
										Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Peralatan Kantor	Sekretariat
										Penyediaan Bahan Logistik	Tersedianya Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik	Logistik Kantor	Sekretariat

Sasaran Strategis Walikota	Indikator	Sasaran Strategis Kepala OPD	Indikator	Program	Sasaran Program/ Bidang	Indikator Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Aktifitas	Pengampu
										Kantor	Kantor	Kantor yang Disediakan		
										Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cetakan dan Penggandaan	Sekretariat
										Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Bahan Bacaan Perundang-undangan	Sekretariat
										Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Konsultasi SKPD	Sekretariat
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sekretariat
										Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Komunikasi,sumber daya air dan Listrik	Sekretariat
										Penyediaan Jasa Peralatan dan	Tersedianya Jasa Peralatan dan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretariat

Sasaran Strategis Walikota	Indikator	Sasaran Strategis Kepala OPD	Indikator	Program	Sasaran Program/ Bidang	Indikator Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Aktifitas	Pengampu
										Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
										Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Pelayanan Umum Kantor	Sekretariat
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Sekretariat
										Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Pajak Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Sekretariat
										Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Mesin	Sekretariat
										Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana	Tersedianya Pemeliharaan/ Rehabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung	Pemeliharaan Gedung Kantor	Sekretariat

Sasaran Strategis Walikota	Indikator	Sasaran Strategis Kepala OPD	Indikator	Program	Sasaran Program/ Bidang	Indikator Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Aktifitas	Pengampu
										dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi		

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD

Hasil review terhadap Rancangan RKPD dan Hasil Analisis Kebutuhan untuk pelaksanaan Tahun 2025 dapat dijelaskan pada tabel Tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan

RANCANGAN RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	**Urusan Penanaman Modal**				**30.084.382.749**	**Urusan Penanaman Modal**				**35.333.325.922**	
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Tangerang Selatan**	**Nilai PM RB perangkat daerah**	**58**	**28.118.730.199**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Tangerang Selatan**	**Nilai PM RB perangkat daerah**	**60**	**30.902.040.252**	
			Predikat SAKIP	**BB**				**Predikat SAKIP**	**A**		
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tangerang Selatan**	**Nilai AKIP**	**84,35**	**208.667.399**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tangerang Selatan**	**Nilai AKIP**	**84,35**	**313.697.541**	
	Penyusunan Dokumen	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	66.726.170	Penyusunan Dokumen	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	155.106.210	

RANCANGAN RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perencanaan Perangkat Daerah		Perencanaan Perangkat Daerah			Perencanaan Perangkat Daerah		Perencanaan Perangkat Daerah			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	8.265.420	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	11.368.800	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	8.265.420	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	11.213.300	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.132.710	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	7.434.400	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	8.265.420	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	10.513.300	
	Koordinasi dan	Tangerang	Jumlah Laporan	9 Laporan	27.676.986	Koordinasi dan	Tangerang	Jumlah Laporan	9 Laporan	29.482.470	

RANCANGAN RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Selatan	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Selatan	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	29.925.886	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	28.253.400	
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	5.302.420	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	5.302.420	
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Tangerang Selatan	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	10.499.961	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Tangerang Selatan	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	10.499.961	
	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan	Tangerang Selatan	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu	1 Berita Acara	24.367.460	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan	Tangerang Selatan	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu	1 Berita Acara	29.617.460	

RANCANGAN RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perangkat Daerah		dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	5 Dokumen	15.239.546	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	5 Dokumen	14.905.820	
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tangerang Selatan**	**Presentase Capaian Realisasi Keuangan pertahun**	**93,00%**	**18.204.278.661**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tangerang Selatan**	**Presentase Capaian Realisasi Keuangan pertahun**	**93,00%**	**17.876.417.443**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tangerang Selatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang	18.130.307.548	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tangerang Selatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang	17.789.645.613	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1.618.905	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1.618.980	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujuian / Verifikasi Keuangan SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	2.289.749	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujuian / Verifikasi Keuangan SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	2.289.960	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaa Akuntansi SKPD	1 Dokumen	2.763.980	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaa Akuntansi SKPD	1 Dokumen	4.763.980	

RANCANGAN RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	13.725.754	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	14.925.810	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	5.639.821	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	5.639.940	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	42.988.144	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	52.588.180	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	4.944.760	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	4.944.980	
3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tangerang Selatan**	**Presentase Cakupan Administrasi Kepegawaian**	**100%**	**36.680.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tangerang Selatan**	**Presentase Cakupan Administrasi Kepegawaian**	**100%**	**195.055.000**	

RANCANGAN RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Perangkat Daerah					**Perangkat Daerah**			
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tangerang Selatan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tangerang Selatan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	175 Orang	158.375.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tangerang Selatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	13.760.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tangerang Selatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	13.760.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tangerang Selatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	22.920.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tangerang Selatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	22.920.000	
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tangerang Selatan**	**Presentase Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**1.045.262.993**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tangerang Selatan**	**Presentase Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**2.724.413.600**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tangerang Selatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	45.679.872	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tangerang Selatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	100.733.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tangerang Selatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	130.723.566	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tangerang Selatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	1.271.597.600	
	Penyediaan Bahan	Tangerang	Jumlah Paket	3 Paket	207.883.934	Penyediaan Bahan	Tangerang	Jumlah Paket	3 Paket	315.386.000	

RANCANGAN RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Logistik Kantor	Selatan	Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			Logistik Kantor	Selatan	Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tangerang Selatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	77.635.621	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tangerang Selatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	331.217.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	462.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	357.500.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	120.840.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	347.980.000	
5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tangerang Selatan**	**Waktu Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1 Tahun**	**7.279.216.884**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tangerang Selatan**	**Waktu Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1 Tahun**	**7.784.879.188**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	100.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.014.043.512	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.243.020.636	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	1 Laporan	30.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	1 Laporan	120.594.000	

RANCANGAN RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Disediakan					Disediakan			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	6.235.173.372	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	6.321.264.552	
6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tangerang Selatan**	**Waktu Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12 Bulan**	**1.344.624.262**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tangerang Selatan**	**Waktu Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12 Bulan**	**2.007.577.480**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tangerang Selatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	98.840.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tangerang Selatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	98.840.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tangerang Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38 Unit	863.310.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tangerang Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38 Unit	1.039.170.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tangerang Selatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	304.056.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tangerang Selatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	672.770.000	

RANCANGAN RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tangerang Selatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	78.418.262	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tangerang Selatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	196.797.480	
II	**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**Tangerang Selatan**	**Jumlah Investor**	**1860 Investor**	**113.565.350**	**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**Tangerang Selatan**	**Jumlah Investor**	**1860 Investor**	**339.289.000**	
7	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Tangerang Selatan**	**Jumlah Dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/Insent if Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**1 Dokumen**	**35.862.350**	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Tangerang Selatan**	**Jumlah Dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/Insent if Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**1 Dokumen**	**92.960.000**	
	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Tangerang Selatan	Jumlah Peraturan Daerah /Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	32.470.350	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Tangerang Selatan	Jumlah Peraturan Daerah /Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	46.480.000	
	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Tangerang Selatan	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar	1 Kegiatan Usaha	3.392.000	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Tangerang Selatan	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar	1 Kegiatan Usaha	46.480.000	

RANCANGAN RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			(PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah					(PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah			
8	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Tangerang Selatan**	**Jumlah Laporan Peta Potensi Investasi**	**1 Laporan**	**77.703.000**	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Tangerang Selatan**	**Jumlah Laporan Peta Potensi Investasi**	**1 Laporan**	**246.329.000**	
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tangerang Selatan	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	38.851.500	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tangerang Selatan	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	90.923.000	
	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	38.851.500	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tangerang Selatan	umlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	155.406.000	
III	**Program Promosi Penanaman Modal**	**Tangerang Selatan**	**Presentase peningkatan calon investor yang menerima informasi potensi investasi daerah**	**100%**	**1.094.637.152**	**Program Promosi Penanaman Modal**	**Tangerang Selatan**	**Presentase peningkatan calon investor yang menerima informasi potensi investasi daerah**	**100%**	**1.297.169.000**	
9	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Tangerang Selatan**	**Jumlah Kegiatan pameran penanaman modal**	**3 Kali**	**1.094.637.152**	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Tangerang Selatan**	**Jumlah Kegiatan pameran penanaman modal**	**3 Kali**	**1.297.169.000**	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal	1 Dokumen	1.088.199.000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal	1 Dokumen	1.219.421.000	

RANCANGAN RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kabupaten/Kota					Kabupaten/Kota			
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten / Kota	Tangerang Selatan	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	6.438.152	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten / Kota	Tangerang Selatan	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	77.748.000	
IV	**Program Pelayanan Penanaman Modal**	**Tangerang Selatan**	**Presentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan sesuai SOP**	**90%**	**587.450.049**	**Program Pelayanan Penanaman Modal**	**Tangerang Selatan**	**Presentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan sesuai SOP**	**90%**	**2.146.960.070**	
10	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Tangerang Selatan**	**Presentase Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**100%**	**587.450.049**	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Tangerang Selatan**	**Presentase Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**100%**	**2.146.960.070**	
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tangerang Selatan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	6300 Pelaku Usaha	50.000.000	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tangerang Selatan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	6300 Pelaku Usaha	975.717.370	

RANCANGAN RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Tangerang Selatan	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	270 Orang	337.450.049	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Tangerang Selatan	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	270 Orang	487.684.700	
	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Tangerang Selatan	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	5300 Kegiatan Usaha	200.000.000	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Tangerang Selatan	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	5300 Kegiatan Usaha	683.558.000	
V	**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**Tangerang Selatan**	**Presentase Pengendalian terhadap Penanaman Modal**	**100%**	**120.000.000**	**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**Tangerang Selatan**	**Presentase Pengendalian terhadap Penanaman Modal**	**100%**	**586.943.200**	
11	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah**	**Tangerang Selatan**	**Jumlah Laporan Kegiatan Monev Penanaman Modal**	**4 Laporan**	**120.000.000**	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan**	**Tangerang Selatan**	**Jumlah Laporan Kegiatan Monev Penanaman Modal**	**4 Laporan**	**586.943.200**	

RANCANGAN RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kabupaten/Kota					**Daerah Kabupaten/Kota**					
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Tangerang Selatan	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	5 Kegiatan Usaha	25.000.000	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Tangerang Selatan	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	5 Kegiatan Usaha	139.580.000	
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Tangerang Selatan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	30 Pelaku Usaha	45.000.000	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Tangerang Selatan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	30 Pelaku Usaha	275.000.000	
	Pengawasan Penanaman Modal	Tangerang Selatan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan	22 Kegiatan Usaha	50.000.000	Pengawasan Penanaman Modal	Tangerang Selatan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan	22 Kegiatan Usaha	172.363.200	

RANCANGAN RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha					Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha			
VI	**Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**Tangerang Selatan**	**Presentase potensi investasi yang terintegrasi dalam sistem informasi penanaman modal**	**100%**	**49.999.999**	**Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**Tangerang Selatan**	**Presentase potensi investasi yang terintegrasi dalam sistem informasi penanaman modal**	**100%**	**60.924.400**	
12	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Tangerang Selatan**	**Jumlah media informasi dan data perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara Elektronik**	**1 Jenis**	**49.999.999**	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Tangerang Selatan**	**Jumlah media informasi dan data perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara Elektronik**	**1 Jenis**	**60.924.400**	
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tangerang Selatan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatka	1 Dokumen	49.999.999	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tangerang Selatan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatka	1 Dokumen	60.924.400	
JUMLAH					**30.084.382.749**	**JUMLAH**				**35.333.325.922**	

Rancangan RKPD tahun 2025 yang tersaji pada Tabel 2.4 diatas merupakan telaahan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/ kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan berdasarkan rancangan RKPD. Pada rancangan RKPD pada Tabel 2.4 (pada kolom 2 s/d kolom 6), merupakan analisis rancangan program dan kegiatan dari masing-masing bagian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Materi tersebut dipergunakan untuk pertemuan Forum OPD, sebagai wadah Bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan dan penyelarasan program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan usulan hasil Musrenbang Kecamatan untuk mengisi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

Selanjutnya, pada hasil analisi kebutuhan RKPD (pada kolom 7 s/d kolom 11) adalah penyampaian pagu hasil analisi kebutuhan RKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025. Dengan adanya pagu hasil analisi kebutuhan RKPD dijadikan pedoman dalam penyempurnaan penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan penyusunan RKPD Tahun 2025.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan tahunan Kota Tangerang Selatan selain mengacu pada RPJPD dan RPJMD juga merupakan penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah melalui arah kebijakan pembangunan tahunan yang dalam perumusan dan penyusunannya melibatkan berbagai unsur masyarakat, meliputi LSM, Perguruan Tinggi, Tokoh masyarakat, Tokoh agama, kelompok usaha dan DPRD. Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2025 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2024, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum OPD dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang dan Forum OPD tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentigan. Dalam proses penyusunan perencanaan tersebut diatas tidak ada usulan secara khusus yang di tujukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang

Selatan, umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis sehingga tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak ada kegiatan yang bersumber dari usulan masyarakat.

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kota Tangerang Selatan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Usulan Pemangku Kepentingan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DPMPTSP KOTA TANGERANG SELATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional jangka menengah tahun 2020-2024 didasarkan pada Visi "Terwujudnya Indonesia Yang Maju, Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong". Visi tersebut akan diwujudkan melalui pelaksanaan 9 (sembilan) Misi pembangunan yang dikenal dengan Nawacita kedua. Strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita kedua, Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama yang mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi. Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi pembangunan jangka menengah nasional, terdapat 7 (tujuh) agenda prioritas pembangunan nasional yang harus diperhatikan sesuai dengan tingkat kewenangan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pokok pembangunan nasional. Adapun 7 (tujuh) agenda prioritas pembangunan nasional yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan,
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan,
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan,
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar,
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim,
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Program Nasional mempunyai dua kebijakan utama yang terkait dengan kegiatan penanaman modal yaitu Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi serta Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi. Untuk Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam mendukung program-program kebijakan utama tersebut dilakukan melalui Program Kegiatan seperti diuraikan pada Tabel 3.1 berikut ini;

Tabel 3.1
Telaahan Sinkronisasi Prioritas Nasional

Nama Perangkat Daerah: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	Prioritas Nasional	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan iklim penanaman modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPMPTSP
				Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	DPMPTSP
			Pembuatan peta potensi kabupaten/ kota	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP
				Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	DPMPTSP
		Promosi penanaman modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP
				Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	DPMPTSP
		Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektroni	DPMPTSP

No.	Prioritas Nasional	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Kabupaten/ Kota		
				Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	DPMPTSP
				Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	DPMPTSP
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	DPMPTSP
				Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	DPMPTSP
				Pengawasan Penanaman Modal	DPMPTSP
		Pengeloaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DPMPTSP

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP Kota Tangerang Selatan

Dalam rangka mendukung Visi Pemerintah Kota Tangerang Selatan **"TERWUJUDNYA TANGSEL UNGGUL MENUJU KOTA LESTARI, SALING TERKONEKSI, EFEKTIF DAN EFISEIN"** maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Selatan mengambil Misi 1 (satu) dari 5 (lima) yang telah di tetapkan dalam RPJMD Tahun 2021 - 2026 sebagai berikut:

"MENINGKATKAN EKONOMI BERBASIS NILAI TAMBAH TINGGI DI SEKTOR EKONOMI KREATIF".

Renja DPMPTSP Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra DPMPTSP Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja DPMPTSP Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra DPMPTSP Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra DPMPTSP Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja DPMPTSP Kota Tangerang Selatan Tahun 2025, yaitu :

- Meningkatkan Proporsi Investasi Terhadap PDRB dengan indikator Proporsi Investasi Terhadap PDRB.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran DPMPTSP Kota Tangerang Selatan yaitu:

1. Meningkatnya Nilai Investasi dengan indikator Nilai Investasi
2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perizinan dan Non perizinan dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2

Perumusan Tujuan dan Sasaran Ranhir Renja PD Tahun 2025

No	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025	Iku Tahun 2025	Iku Urusan / Perangkat Daerah Tahun 2025	Tujuan	Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mendorong pertumbuhan investasi sektor perdagangan dan jasa termasuk ekonomi kreatif					
		Nilai investasi tahunan (Triliun Rupiah)				8,4 - 8,7 T (Rp)
			Indeks Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Perizinan)			90,00 Nilai
				Meningkatkan Proporsi Investasi Terhadap PDRB		45%
					Meningkatnya Nilai Investasi	8,4 - 8,7 T (Rp)
					Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perizinan dan Non perizinan	90,00 Nilai

3.3 Program dan Kegiatan DPMPTSP Kota Tangerang Selatan

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Tahun 2025, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan berpedoman pada RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 serta Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026;
2. Program, kegiatan dan sub kegiatan mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Tangerang Selatan;
3. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis;
4. Sumber-sumber pendanaan yang ada dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan yaitu Meningkatkan Proporsi Investasi Terhadap PDRB, telah ditetapkan sasaran melalui pencapaian Meningkatnya Nilai Investasi dan Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perizinan dan Non perizinan harus dilakukan identifikasi permasalahan untuk penentuan program prioritas seperti diuraikan pada Tabel 3.3 berikut ini.

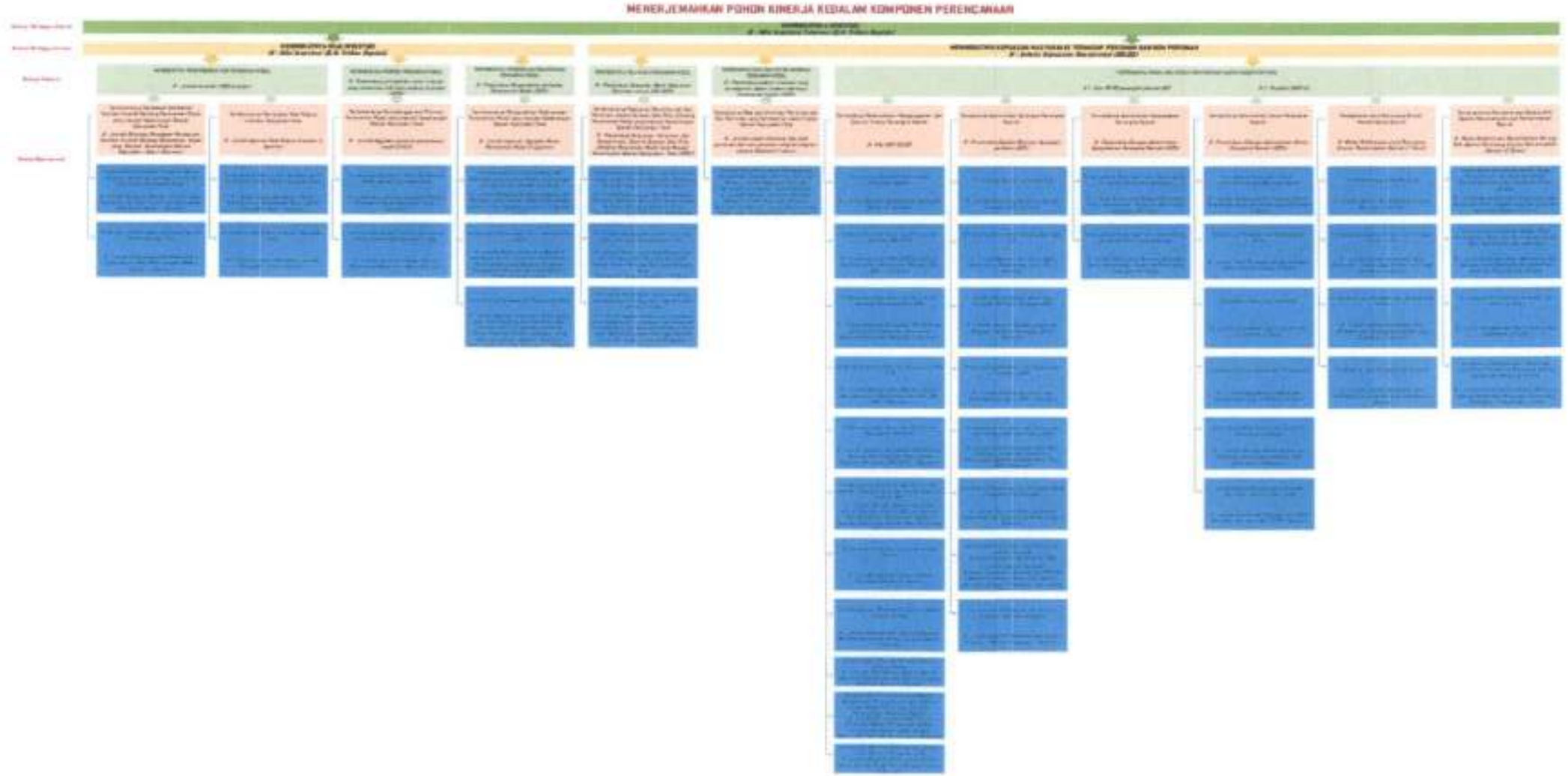
Tabel 3.3

Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Urusan	Target Tahun 2023	Capaian Target s.d. Tahun 2023	Perkiraan Capaian Tahun 2023	Interpretasi Capaian Target Belum tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Nilai investasi tahunan (Triliun Rupiah)	4,66	7,44	7,44	Melampaui (>)	-	Dengan di laksanakan kegiatan PENSI LKPM adalah pembinaan & asistensi laporan kegiatan penanaman modal (PENSI LKPM) bertujuan memudahkan pelaku usaha dalam melaporkan LKPM melalui sistem online single submisission (OSS) dengan cara pelaku usaha datang kekantor DPMPTSP untuk memberikan pendampingan atau asistensi dalam mengisi LKPM.
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Perizinan)	89	89,05	89,05	Melampaui (>)	-	Indeks Kepuasan Masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Tabel 3.4

Pohon Kinerja DPMPTSP Tahun 2025



Sesuai dengan visi Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026 yaitu "Terwujudnya Tangsel Unggul Menuju Kota Lestari, Saling Terkoneksi, Efektif Dan Efisein", maka uraian program beserta kegiatan yang dirancang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Nilai PM RB perangkat daerah dengan target sebesar 58 dan indikator Predikat SAKIP dengan target sebesar BB dengan didukung 6 kegiatan sebagai berikut:

   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

      Sub Kegiatan:

      - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
      - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
      - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD

   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

      Sub Kegiatan:

      - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
      - Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujuian/Verifikasi Keuangan SKPD
      - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
      - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
      - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan:

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan:

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Jumlah Investor dengan target sebesar 1860 Investor dengan didukung 2 kegiatan sebagai berikut:

a. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

- Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
- Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

- Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
- Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

3. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Presentase peningkatan calon investor yang menerima informasi potensi investasi daerah dengan target sebesar 100% dengan didukung 1 kegiatan sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

- Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
- Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Presentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan sesuai SOP sebesar 90% dengan didukung 1 kegiatan sebagai berikut:

a. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

- Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
- Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
- Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Presentase Pengendalian terhadap Penanaman Modal dengan target sebesar 100% dengan didukung 1 kegiatan sebagai berikut:

a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

- Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya

- Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
- Pengawasan Penanaman Modal

6. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Presentase potensi investasi yang terintegrasi dalam sistem informasi penanaman modal dengan target sebesar 100% dengan didukung 1 kegiatan sebagai berikut:

a. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

- Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Dari uraian tersebut diatas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan merencanakan 6 (enam) Program, 12 (dua belas) Kegiatan dan 47 (empat puluh tujuh) Sub Kegiatan.

Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026 secara lebih lengkap disajikan pada tabel 3.5. Adapun kegiatan unggulan/prioritasn yang akan menjadi fokus pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan tahun 2025 antara lain:

Tabel 3.5
Rumusan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 Kota Tangerang Selatan

Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rancana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					3	3	4	5	6	7	8	9	10
2	**18**				**Urusan Penanaman Modal**				**30.084.382.749**				**35.333.325.922**
2	**18**	**1**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai PM RB perangkat daerah**	**Tangerang Selatan**	**58**	**28.118.730.199**	**Pajak Daerah**		**61**	**30.902.040.252**
						Predikat SAKIP		**BB**				**A**	
2	**18**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai AKIP**	**Tangerang Selatan**	**84,35**	**208.667.399**	**Pajak Daerah**		**84,70**	**313.697.541**
2	18	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tangerang Selatan	2 Dokumen	66.726.170	Pajak Daerah		2 Dokumen	155.106.210
2	18	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tangerang Selatan	2 Dokumen	8.265.420	Pajak Daerah		2 Dokumen	11.368.800
2	18	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tangerang Selatan	2 Dokumen	8.265.420	Pajak Daerah		2 Dokumen	11.213.300
2	18	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tangerang Selatan	1 Dokumen	4.132.710	Pajak Daerah		1 Dokumen	7.434.400
2	18	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tangerang Selatan	1 Dokumen	8.265.420	Pajak Daerah		2 Dokumen	10.513.300
2	18	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tangerang Selatan	9 Laporan	27.676.986	Pajak Daerah		9 Laporan	29.482.470
2	18	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tangerang Selatan	6 Laporan	29.925.886	Pajak Daerah		6 Laporan	28.253.400

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rancana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	18	1	2.01	8	Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Tangerang Selatan	1 Dokumen	5.302.420	Pajak Daerah		1 Dokumen	5.302.420
2	18	1	2.01	9	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Tangerang Selatan	1 Data	10.499.961	Pajak Daerah		1 Data	10.499.961
2	18	1	2.01	10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tangerang Selatan	1 Berita Acara	24.367.460	Pajak Daerah		1 Berita Acara	29.617.460
2	18	1	2.01	11	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Tangerang Selatan	5 Dokumen	15.239.546	Pajak Daerah		5 Dokumen	14.905.820
2	**18**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Presentase Capaian Realisasi Keuangan pertahun**	**Tangerang Selatan**	**93,00%**	**18.204.278.661**	**Pajak Daerah / DAU**		**94,00%**	**17.876.417.443**
2	18	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tangerang Selatan	56 Orang	18.130.307.548	Pajak Daerah / DAU		56 Orang	17.789.645.613
2	18	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tangerang Selatan	1 Dokumen	1.618.905	Pajak Daerah		1 Dokumen	1.618.980
2	18	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujuian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tangerang Selatan	1 Dokumen	2.289.749	Pajak Daerah		1 Dokumen	2.289.960
2	18	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaa Akuntansi SKPD	Tangerang Selatan	1 Dokumen	2.763.980	Pajak Daerah		1 Dokumen	4.763.980
2	18	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tangerang Selatan	1 Laporan	13.725.754	Pajak Daerah		1 Laporan	14.925.810
2	18	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Tangerang Selatan	2 Dokumen	5.639.821	Pajak Daerah		2 Dokumen	5.639.940
2	18	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Tangerang Selatan	6 Laporan	42.988.144	Pajak Daerah		6 Laporan	52.588.180

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rancana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD							
2	18	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tangerang Selatan	1 Dokumen	4.944.760	Pajak Daerah		1 Dokumen	4.944.980
2	**18**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Presentase Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tangerang Selatan**	**100%**	**36.680.000**	**Pajak Daerah**		**100%**	**195.055.000**
2	18	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Tangerang Selatan	-	-	Pajak Daerah		-	158.375.000
2	18	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tangerang Selatan	60 Orang	13.760.000	Pajak Daerah		60 Orang	13.760.000
2	18	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tangerang Selatan	60 Orang	22.920.000	Pajak Daerah		60 Orang	22.920.000
2	**18**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tangerang Selatan**	**100%**	**1.045.262.993**	**Pajak Daerah**		**100%**	**2.724.413.600**
2	18	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tangerang Selatan	3 Paket	45.679.872	Pajak Daerah		3 Paket	100.733.000
2	18	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tangerang Selatan	6 Paket	130.723.566	Pajak Daerah		6 Paket	1.271.597.600
2	18	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tangerang Selatan	3 Paket	207.883.934	Pajak Daerah		3 Paket	315.386.000
2	18	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tangerang Selatan	6 Paket	77.635.621	Pajak Daerah		6 Paket	331.217.000
2	18	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tangerang Selatan	3 Dokumen	462.500.000	Pajak Daerah		3 Dokumen	357.500.000
2	18	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tangerang Selatan	1 Laporan	120.840.000	Pajak Daerah		1 Laporan	347.980.000
2	**18**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Waktu Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tangerang Selatan**	**1 Tahun**	**7.279.216.884**	Pajak Daerah		**1 Tahun**	**7.784.879.188**
2	18	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tangerang Selatan	1 Laporan	-	Pajak Daerah		1 Laporan	100.000.000
2	18	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Tangerang	1 Laporan	1.014.043.512	Pajak		1 Laporan	1.243.020.636

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rancana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Sumber Daya Air dan Listrik	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Selatan			Daerah			
2	18	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tangerang Selatan	1 Laporan	30.000.000	Pajak Daerah		1 Laporan	120.594.000
2	18	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tangerang Selatan	1 Laporan	6.235.173.372	Pajak Daerah		1 Laporan	6.321.264.552
2	**18**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Waktu Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tangerang Selatan**	**12 Bulan**	**1.344.624.262**	**Pajak Daerah**		**12 Bulan**	**2.007.577.480**
2	18	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Tangerang Selatan	2 Unit	98.840.000	Pajak Daerah		2 Unit	98.840.000
2	18	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tangerang Selatan	38 Unit	863.310.000	Pajak Daerah		38 Unit	1.039.170.000
2	18	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Tangerang Selatan	10 Unit	304.056.000	Pajak Daerah		10 Unit	672.770.000
2	18	1	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Tangerang Selatan	1 Unit	78.418.262	Pajak Daerah		1 Unit	196.797.480
2	**18**	**2**			**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**Jumlah Investor**	**Tangerang Selatan**	**1860 Investor**	**113.565.350**	**Pajak Daerah**		**1910 Investor**	**339.289.000**
2	**18**	**2**	**2.01**		**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Tangerang Selatan**	**1 Dokumen**	**35.862.350**	**Pajak Daerah**		**1 Dokumen**	**92.960.000**
2	18	2	2.01	1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah /Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Tangerang Selatan	1 Dokumen	32.470.350	Pajak Daerah		1 Dokumen	46.480.000

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rancana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	18	2	2.01	3	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Tangerang Selatan	1 Kegiatan Usaha	3.392.000	Pajak Daerah		1 Kegiatan Usaha	46.480.000
2	**18**	**2**	**2.02**		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Jumlah Laporan Peta Potensi Investasi**	Tangerang Selatan	**1 Laporan**	**77.703.000**	**Pajak Daerah**		**1 Laporan**	**246.329.000**
2	18	2	2.02	1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tangerang Selatan	1 Dokumen	38.851.500	Pajak Daerah		1 Dokumen	90.923.000
2	18	2	2.02	4	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	umlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tangerang Selatan	1 Dokumen	38.851.500	Pajak Daerah		1 Dokumen	155.406.000
2	**18**	**3**			**Program Promosi Penanaman Modal**	**Presentase peningkatan calon investor yang menerima informasi potensi investasi daerah**	Tangerang Selatan	**100%**	**1.094.637.152**	**Pajak Daerah**		**100%**	**1.297.169.000**
2	**18**	**3**	**2.01**		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kegiatan pameran penanaman modal**	**Tangerang Selatan**	**3 Kali**	**1.094.637.152**	**Pajak Daerah**		**3 Kali**	**1.297.169.000**
2	18	3	2.01	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Tangerang Selatan	1 Dokumen	1.088.199.000	Pajak Daerah		1 Dokumen	1.219.421.000
2	18	3	2.01	3	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Tangerang Selatan	1 Dokumen	6.438.152	Pajak Daerah		1 Dokumen	77.748.000
2	**18**	**4**			**Program Pelayanan Penanaman Modal**	**Presentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan sesuai SOP**	**Tangerang Selatan**	**90%**	**587.450.049**	**Pajak Daerah**		**90%**	**2.146.960.070**
2	**18**	**4**	**2.01**		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Presentase Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Tangerang Selatan**	**100%**	**587.450.049**	**Pajak Daerah**		**100%**	**2.146.960.070**
2	18	4	2.01	6	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tangerang Selatan	6300 Pelaku Usaha	50.000.000	Pajak Daerah		6300 Pelaku Usaha	975.717.370

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rancana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	18	4	2.01	7	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tangerang Selatan	270 Orang	337.450.049	Pajak Daerah		270 Orang	487.684.700
2	18	4	2.01	8	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Tangerang Selatan	5300 Kegiatan Usaha	200.000.000	Pajak Daerah		5300 Kegiatan Usaha	683.558.000
2	**18**	**5**			**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**Presentase Pengendalian terhadap Penanaman Modal**	**Tangerang Selatan**	**100%**	**120.000.000**	**Pajak Daerah / DAK**		**100%**	**586.943.200**
2	**8**	**5**	**2.01**		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Laporan Kegiatan Monev Penanaman Modal**	**Tangerang Selatan**	**4 Laporan**	**120.000.000**	Pajak Daerah / DAK		**4 Laporan**	**586.943.200**
2	8	5	2.01	4	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Tangerang Selatan	5 Kegiatan Usaha	25.000.000	Pajak Daerah / DAK		5 Kegiatan Usaha	139.580.000
2	8	5	2.01	5	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Tangerang Selatan	30 Pelaku Usaha	45.000.000	Pajak Daerah / DAK		30 Pelaku Usaha	275.000.000
2	8	5	2.01	6	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Tangerang Selatan	22 Kegiatan Usaha	50.000.000	Pajak Daerah / DAK		22 Kegiatan Usaha	172.363.200
2	**18**	**6**			**Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi**	**Presentase potensi investasi yang terintegrasi dalam sistem informasi**	Tangerang Selatan	**100%**	**49.999.999**	**Pajak Daerah**		**100%**	**60.924.400**

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rancana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Penanaman Modal	**penanaman modal**							
2	**18**	**6**	**2.01**		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah media informasi dan data perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara Elektronik**	**Tangerang Selatan**	**1 Jenis**	**49.999.999**	**Pajak Daerah**		**1 Jenis**	**60.924.400**
2	18	6	2.01	2	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Tangerang Selatan	1 Dokumen	49.999.999	Pajak Daerah		1 Dokumen	60.924.400

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP KOTA TANGERANG SELATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja DPMPTSP Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Mempedomani RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 serta Rancangan Renstra DPMPTSP Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026, dalam pembangunan daerah Kota Tangerang Selatan yang tertuang dalam Misi Ke 4 yaitu "Meningkatkan Ekonomi Berbasis Nilai Tambah Tinggi Di Sektor Ekonomi Kreatif" yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu:

   Tujuan:

   Meningkatkan Proporsi Investasi Terhadap PDRB dengan indikator Proporsi Investasi Terhadap PDRB

   Sasaran:

   a. Meningkatnya Nilai Investasi
   b. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perizinan dan Non perizinan
3. Secara khusus, dalam Renstra DPMPTSP memiliki peran dalam pencapaian sasaran pembangunan RPJMD yaitu "Meningkatnya Investasi".
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis DPMPTSP Kota Tangerang Selatan.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja DPMPTSP Kota Tangerang Selatan Tanah Bumbu Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan DPMPTSP Kota Tangerang Selatan pada tahun 2025 adalah sebanyak 6 program, yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 5 program pelaksanaan / pembangunan;
2. Jumlah kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan DPMPTSP Kota Tangerang Selatan pada tahun 2025 adalah sebanyak 12 kegiatan, dan 48 sub Kegiatan;
3. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja DPMPTSP Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 adalah sebesar Rp.30.084.382.749,- yang bersumber dari dana APBD Kota Tangerang Selatan, dengan perincian :
   a. Rp.28.118.730.199,- untuk program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah / eks rutin).
   b. Rp.1.965.652.550,- untuk program dan kegiatan pelaksanaan/ pembangunan.

Adapun rencana program dan kegiatan pada Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025 (Pencapaian IKU-IKU Urusan-IKK Output Tahun 2025)

Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Sasaran Pemda	Indikator Kinerja Utama/ Indikator Kinerja Urusan	Target 2025	Indikator Kinerja Kunci Output (Permendagri 18 Tahun 2020)	Target 2025 (sesuai rencana OPD untuk mencapai IKK)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Pekerjaan	Rencana Target Kinerja / Volume Tahun 2025	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Meningkatnya Investasi	Nilai investasi tahunan (Triliun Rupiah)	8,4 - 8,7 T (Rp)	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Perizinan)	90,00	Pengembangan iklim penanaman modal			Jumlah Investor	113.565.350		1860 Investor	
							Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	35.862.350		1 Dokumen	
								Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah /Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	32.470.350	FGD Perwal Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dan Sosialisasi Perwal Penetapan	1 Dokumen	

No	Sasaran Pemda	Indikator Kinerja Utama/ Indikator Kinerja Urusan	Target 2025	Indikator Kinerja Kunci Output (Permendagri 18 Tahun 2020)	Target 2025 (sesuai rencana OPD untuk mencapai IKK)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Pekerjaan	Rencana Target Kinerja / Volume Tahun 2025	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
											Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		
								Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	3.392.000	Rapat Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	
							Pembuatan peta potensi kabupaten/kota		**Jumlah Laporan Peta Potensi Investasi**	**77.703.000**		**1 Laporan**	
								Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	38.851.500	Penyusunan Draft Raperwal Rencana Umum Penanaman Modal	1 Dokumen	
								Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	umlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	38.851.500	Kajian Peta potensi investasi sektor transportasi	1 Dokumen	
						Program promosi penanaman modal			**Presentase peningkatan calon investor yang menerima**	**1.094.637.152**		**100%**	

No	Sasaran Pemda	Indikator Kinerja Utama/ Indikator Kinerja Urusan	Target 2025	Indikator Kinerja Kunci Output (Permendagri 18 Tahun 2020)	Target 2025 (sesuai rencana OPD untuk mencapai IKK)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Pekerjaan	Rencana Target Kinerja / Volume Tahun 2025	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
									informasi potensi investasi daerah				
							Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		**Jumlah Kegiatan pameran penanaman modal**	**1.094.637.152**		**3 Kali**	
								Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1.088.199.000	Rapat Promosi daerah, Launching Apeksi, Pameran Apeksi 2025, Pameran Nasional, Temu Investor, Invesment Award	1 Dokumen	
								Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	6.438.152	Coffe Morning	1 Dokumen	
						Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal			**Presentase Pengendalian terhadap Penanaman Modal**	**120.000.000**		**100%**	

No	Sasaran Pemda	Indikator Kinerja Utama/ Indikator Kinerja Urusan	Target 2025	Indikator Kinerja Kunci Output (Permendagri 18 Tahun 2020)	Target 2025 (sesuai rencana OPD untuk mencapai IKK)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Pekerjaan	Rencana Target Kinerja / Volume Tahun 2025	Ket
(1)	(3)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		**Jumlah Laporan Kegiatan Monev Penanaman Modal**	**120.000.000**		**4 Laporan**	
								Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	25.000.000	Identifikasi Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya, Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	5 Kegiatan Usaha	
								Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha	45.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Sosialisasi Implementasi	30 Pelaku Usaha	

No	Sasaran Pemda	Indikator Kinerja Utama/ Indikator Kinerja Urusan	Target 2025	Indikator Kinerja Kunci Output (Permendagri 18 Tahun 2020)	Target 2025 (sesuai rencana OPD untuk mencapai IKK)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Pekerjaan	Rencana Target Kinerja / Volume Tahun 2025	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
									Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		
								Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan	50.000.000	Pengawasan Penanaman Modal	22 Kegiatan Usaha	
2	**Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perizinan dan Non perizinan**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**90,00**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Perizinan)**	**90,00**	**Pelayanan Penanaman Modal**			**Presentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan sesuai SOP**	**587.450.049**		**90%**	
							Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman		**Presentase Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang**	**587.450.049**		**100%**	

No	Sasaran Pemda	Indikator Kinerja Utama/ Indikator Kinerja Urusan	Target 2025	Indikator Kinerja Kunci Output (Permendagri 18 Tahun 2020)	Target 2025 (sesuai rencana OPD untuk mencapai IKK)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Pekerjaan	Rencana Target Kinerja / Volume Tahun 2025	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		**Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**				
								Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektroni	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	50.000.000	Pelayanan Keliling Penerbitan NIB Tim JOSS (Jemput Online Single Submission), Sosialisasi Persyaratan SIP, Rapat Kelompok Kerja II, Rapat Kelompok Kerja III, Rapat Kelompok Kerja PPDB	6300 Pelaku Usaha	
								Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	337.450.049	ISO 9001:2015, SKM, Regulasi/ Advokasi, Pengaduan Masyarakat, Pendampingan Penilaian PTSP, Evaluasi Standar Pelayanan dan SOP	270 Orang	

No	Sasaran Pemda	Indikator Kinerja Utama/ Indikator Kinerja Urusan	Target 2025	Indikator Kinerja Kunci Output (Permendagri 18 Tahun 2020)	Target 2025 (sesuai rencana OPD untuk mencapai IKK)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Pekerjaan	Rencana Target Kinerja / Volume Tahun 2025	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
								Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	200.000.000	Pemantauan Kelompok Kerja Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Pemantauan Perizinan Kelompok Kerja I, Pemantauan Perizinan Kelompok Kerja II, Pemantauan Perizinan Kelompok Kerja III	5300 Kegiatan Usaha	
						Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal			**Presentase potensi investasi yang terintegrasi dalam sistem informasi penanaman modal**	**49.999.999**		**100%**	
							pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/ kota		**Jumlah media informasi dan data perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara Elektronik**	**49.999.999**		**1 Jenis**	

No	Sasaran Pemda	Indikator Kinerja Utama/ Indikator Kinerja Urusan	Target 2025	Indikator Kinerja Kunci Output (Permendagri 18 Tahun 2020)	Target 2025 (sesuai rencana OPD untuk mencapai IKK)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Pekerjaan	Rencana Target Kinerja / Volume Tahun 2025	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
								Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatka	49.999.999	Fasilitasi dan dokumentasi pmeliharaan sistem perizinan dan non perizinan	1 Dokumen	
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			**Nilai PM RB perangkat daerah**	**28.118.730.199**		**58**	
									Predikat SAKIP			**BB**	
							Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Nilai AKIP**	**208.667.399**		**84,30**	
								Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	66.726.170	RKT 2025, Renstra 2025-2029	2 Dokumen	
								Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	8.265.420	RKA 2026, DRPK, ROK 2026	2 Dokumen	

No	Sasaran Pemda	Indikator Kinerja Utama/ Indikator Kinerja Urusan	Target 2025	Indikator Kinerja Kunci Output (Permendagri 18 Tahun 2020)	Target 2025 (sesuai rencana OPD untuk mencapai IKK)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Pekerjaan	Rencana Target Kinerja / Volume Tahun 2025	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
									Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				
								Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.265.420	RKA Perubahan 2025, DRPK dan ROK Perubahan 2025	1 Dokumen	
								Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4.132.710	DPA 2026	1 Dokumen	
								Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	8.265.420	Pergeseran Anggaran, DPA Perubahan 2025	2 Dokumen	

No	Sasaran Pemda	Indikator Kinerja Utama/ Indikator Kinerja Urusan	Target 2025	Indikator Kinerja Kunci Output (Permendagri 18 Tahun 2020)	Target 2025 (sesuai rencana OPD untuk mencapai IKK)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Pekerjaan	Rencana Target Kinerja / Volume Tahun 2025	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27.676.986	Laporan Bulanan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah [LPPD] Tahun 2024, LKPJ Tahun 2024, Indikator Kinerja Kunci [IKK] Tahun 2024, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah [LAKIP] Tahun 2024, Daftar Penilaian Resiko, DPR Tahun 2025, SPIP Tahun 2025, Sistem Informasi Pembangunan Daerah [SIPD], Laporan Akhir Tahun	9 Laporan	
								Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.925.886	Evaluasi Kegiatan, Monev Rencana Aksi, Monev Rencana Aksi DPR, Monev Renstra, Evaluasi RENJA, Evaluasi SPIP	6 Laporan	
								Penyelenggaraan Walidata Pendukung	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan	5.302.420	Walidata Pendukung Statistik	1 Dokumen	

No	Sasaran Pemda	Indikator Kinerja Utama/ Indikator Kinerja Urusan	Target 2025	Indikator Kinerja Kunci Output (Permendagri 18 Tahun 2020)	Target 2025 (sesuai rencana OPD untuk mencapai IKK)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Pekerjaan	Rencana Target Kinerja / Volume Tahun 2025	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
								Statistik Sektoral Daerah	Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		Sektoral Daerah		
								Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	10.499.961	Pengumpulan Data Statistik Sektoral	1 Data	
								Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.367.460	Forum OPD	1 Berita Acara	
								Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	15.239.546	ndikator Kinerja Utama [IKU] dan Penyusunan Penetapan Kinerja [2025], Indikator Kinerja Individu [IKI] Tahun 2025, Pohon Kinerja [CASCADING],	5 Dokumen	

No	Sasaran Pemda	Indikator Kinerja Utama/ Indikator Kinerja Urusan	Target 2025	Indikator Kinerja Kunci Output (Permendagri 18 Tahun 2020)	Target 2025 (sesuai rencana OPD untuk mencapai IKK)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Pekerjaan	Rencana Target Kinerja / Volume Tahun 2025	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
											Rencana Kerja Tahunan [RKT]		
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Presentase Capaian Realisasi Keuangan pertahun**	**18.204.278.661**		**93,00%**	
								Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18.130.307.548	Gaji dan Tunjangan	56 Orang	
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semester SKPD	42.988.144	Laporan Keuangan Bulanan, Rekonsiliasi SP2D, Rekonsialisasi Barang Pakai Habis dan Aset, Laporan Keuangan Semester, Laporan Pajak Semester, Laporan Daftar Transaksi Harian Semester	6 Laporan	
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.725.754	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun,Penyusunan Laporan Barang Pakai Habis dan Aset SKPD Akhir Tahun,Penyusunan Laporan Realisasi	1 Laporan	

No	Sasaran Pemda	Indikator Kinerja Utama/ Indikator Kinerja Urusan	Target 2025	Indikator Kinerja Kunci Output (Permendagri 18 Tahun 2020)	Target 2025 (sesuai rencana OPD untuk mencapai IKK)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Pekerjaan	Rencana Target Kinerja / Volume Tahun 2025	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
											Keuangan Akhir Tahun		
								Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.944.760	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	
								Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggaran Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5.639.821	Fasilitasi Persiapan Pemeriksaan Inspektorat,Fasilitasi Penyelesaian TLHP Inspektorat,Fasilitasi Persiapan Pemeriksaan BPK	2 Dokumen	
								Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.763.980	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	
								Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	2.289.749	Fasilitasi dan Verifikasi Data Keuangan	1 Dokumen	
								Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.944.760	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	
							Administrasi		**Presentase**	**36.680.000**		**100%**	

No	Sasaran Pemda	Indikator Kinerja Utama/ Indikator Kinerja Urusan	Target 2025	Indikator Kinerja Kunci Output (Permendagri 18 Tahun 2020)	Target 2025 (sesuai rencana OPD untuk mencapai IKK)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Pekerjaan	Rencana Target Kinerja / Volume Tahun 2025	Ket
(1)	(3)	(5)	(6)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							Kepegawaian Perangkat Daerah		**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				
								Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	13.760.000	Sosialisasi Peraturan Bidang Layanan Perizinan	60 Orang	
								Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	22.920.000	Bimbingan Teknis	60 Orang	
							Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Presentase Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.045.262.993**		**100%**	
								Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	45.679.872	Alat Listrik	3 Paket	
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	130.723.566	Peralatan Kantor	1 Paket	

No	Sasaran Pemda	Indikator Kinerja Utama/ Indikator Kinerja Urusan	Target 2025	Indikator Kinerja Kunci Output (Permendagri 18 Tahun 2020)	Target 2025 (sesuai rencana OPD untuk mencapai IKK)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Pekerjaan	Rencana Target Kinerja / Volume Tahun 2025	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	207.883.934	Logistik Kantor	3 Paket	
								Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	77.635.621	Cetakan dan Penggandaan	6 Paket	
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	462.500.000	Bahan Bacaan Perundang-undangan	3 Dokumen	
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120.840.000	Rapat Konsultasi SKPD	1 Laporan	
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Waktu Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**7.279.216.884**		**1 Tahun**	
								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.014.043.512	Penyediaan Komunikasi,sumber daya air dan Listrik	1 Laporan	
								Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	30.000.000	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	

No	Sasaran Pemda	Indikator Kinerja Utama/ Indikator Kinerja Urusan	Target 2025	Indikator Kinerja Kunci Output (Permendagri 18 Tahun 2020)	Target 2025 (sesuai rencana OPD untuk mencapai IKK)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Pekerjaan	Rencana Target Kinerja / Volume Tahun 2025	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
								Kantor	Kantor yang Disediakan				
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6.235.173.372	Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Waktu Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.344.624.262**		**12 Bulan**	
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	98.840.000	Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit	
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	863.310.000	Pajak Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	38 Unit	

No	Sasaran Pemda	Indikator Kinerja Utama/ Indikator Kinerja Urusan	Target 2025	Indikator Kinerja Kunci Output (Permendagri 18 Tahun 2020)	Target 2025 (sesuai rencana OPD untuk mencapai IKK)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Pekerjaan	Rencana Target Kinerja / Volume Tahun 2025	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
								atau Lapangan					
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	304.056.000	Pemeliharaan Mesin	10 Unit	
								Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	78.418.262	Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Unit	
TOTAL PAGU										**30.084.382.749**			

Tabel 4.2

Rencana Kerja Dan Pendanaan Pencapaian Fokus Pembangunan Kepala Daerah Tahun 2025

Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Fokus Pembangunan Kepala Daerah	Konsep	Target 2025	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Tindak/Pekerjaan	Rencana Target Kinerja/Volume Tahun 2025	Pagu (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	**Peningkatan investasi**	**Peningkatan Investasi Di Kota Tangerang Selatan**	**8,4 - 8,7 Triliun (Rupiah)**	**Pengembangan iklim penanaman modal**				**1860 Investor**	**113.565.350**
					Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			**1 Dokumen**	**38.862.350**
						Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	FGD Perwal Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dan Sosialisasi Perwal Penetapan Kebjakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	32.470.350
						Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota	Rapat Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	3.392.000
					Pembuatan peta potensi kabupaten/kota			**1 Laporan**	**77.703.000**
						Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Penyusunan Draft Raperwal Rencana Umum Penanaman Modal	1 Dokumen	38.851.500
						Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Kajian Peta potensi investasi sektor transportasi	1 Dokumen	38.851.500
				Program promosi penanaman modal				**100%**	**1.094.637.152**

No	Fokus Pembangunan Kepala Daerah	Konsep	Target 2025	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Tindak/Pekerjaan	Rencana Target Kinerja/Volume Tahun 2025	Pagu (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			**3 Kali**	**1.094.637.152**
						Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Rapat Promosi daerah, Launching Apeksi, Pameran Apeksi 2025, Pameran Nasional, Temu Investor, Invesment Award	1 Dokumen	1.088.199.000
						Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten / Kota	Coffe Morning	1 Dokumen	6.438.152
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal				**100%**	**120.000.000**
					Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			**4 Laporan**	**120.000.000**
						Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Identifikasi Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya, Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	5 Kegiatan Usaha	25.000.000
						Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Bimbingan Teknis Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	30 Pelaku Usaha	45.000.000
						Pengawasan Penanaman Modal	Pengawasan Penanaman Modal	22 Kegiatan Usaha	50.000.000

No	Fokus Pembangunan Kepala Daerah	Konsep	Target 2025	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Tindak/Pekerjaan	Rencana Target Kinerja/Volume Tahun 2025	Pagu (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Program Pelayanan Penanaman Modal				**90%**	**587.450.049**
					Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			**100%**	**587.450.049**
						Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektroni	Pelayanan Keliling Penerbitan NIB Tim JOSS (Jemput Online Single Submission), Sosialisasi Persyaratan SIP, Rapat Kelompok Kerja II, Rapat Kelompok Kerja III, Rapat Kelompok Kerja PPDB	6300 Pelaku Usaha	50.000.000
						Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	ISO 9001:2015, SKM, Regulasi/ Advokasi, Pengaduan Masyarakat, Pendampingan Penilaian PTSP, Evaluasi Standar Pelayanan dan SOP	270 Orang	337.450.049
						Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Pemantauan Kelompok Kerja Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Pemantauan Perizinan Kelompok Kerja I, Pemantauan Perizinan Kelompok Kerja II, Pemantauan Perizinan Kelompok Kerja III	5300 Kegiatan Usaha	200.000.000
				Program Pengeloaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal				**100%**	**49.999.999**
					Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat			**1 Jenis**	**49.999.999**

No	Fokus Pembangunan Kepala Daerah	Konsep	Target 2025	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Tindak/Pekerjaan	Rencana Target Kinerja/Volume Tahun 2025	Pagu (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					daerah kabupaten/ kota				
5						Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Fasilitasi dan dokumentasi pmeliharaan sistem perizinan dan non perizinan	1 Dokumen	49.999.999
TOTAL PAGU									1.965.652.550

Tabel 4.3
Rencana Kerja Dan Pendanaan Penerapan SPM Tahun 2025
Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Standar Pelayanan Minimal	Jenis Pelayanan	Target Kinerja 2024	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tindak/Pekerjaan	Volume			Pagu (Rp)	Keterangan
						Kebutuhan	Eksisting	Rencana Pemenuhan Tahun 2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Total Pagu									NIHIL	

Tabel 4.4
Rencana Kerja Dan Pendanaan Program Percepatan Penurunan Stunting
Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Tindak/Pekerjaan	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025		
				Target 2025		Pagu (Rp.)
				Volume	Satuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Tabel 4.5
Rencana Kerja Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	Perangkat Daerah	Nama Program Penanggulangan Kemiskinan	Tujuan / Manfaat Program	Kriteria Sasaran	Individu / RT / Keluarga	Jumlah	Kebutuhan Anggaran (Rp.)	Lokasi		Renja/PPAS 2025				Ket
								Kecamatan	Kelurahan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Tabel 4.6
Rencana Kerja dan Pendanaan Program Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025
Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Tindak/Pekerjaan	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		
				Target 2025		Pagu (Rp.)
				Volume	Satuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Tabel 4.7
Rencana Belanja Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Tahun 2025
Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Sub Kegiatan	Jenis Barang	Volume	Pengusul	Tujuan	Calon Penerima
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Ranwal Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan Tahun 2025.antara lain :

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kota Tangerang Selatan;
2. Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini berpedoman pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026;
3. Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini juga berpedoman pada RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Indikator pada sub kegiatan pada tahun 2025 mengalami perubah meyesuaikan berdasarkan Kepmendagri-050-5889, diperlukan penyesuai indikator kerja kembali dalam RENSTRA DPMPTSP 2021-2026.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan Tahun 2025. adalah sebagai berikut :

1. Ranwal Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan Tahun 2025.
2. Berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Tangerang Selatan. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan pembahasan bersama DPRD Kota Tangerang Selatan;

3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Ranwal Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan Tahun 2025.

c. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 untuk setiap triwulannya;
2. Pemetaan terhadap rencana program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan tahun 2025 dengan mengacu pada nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

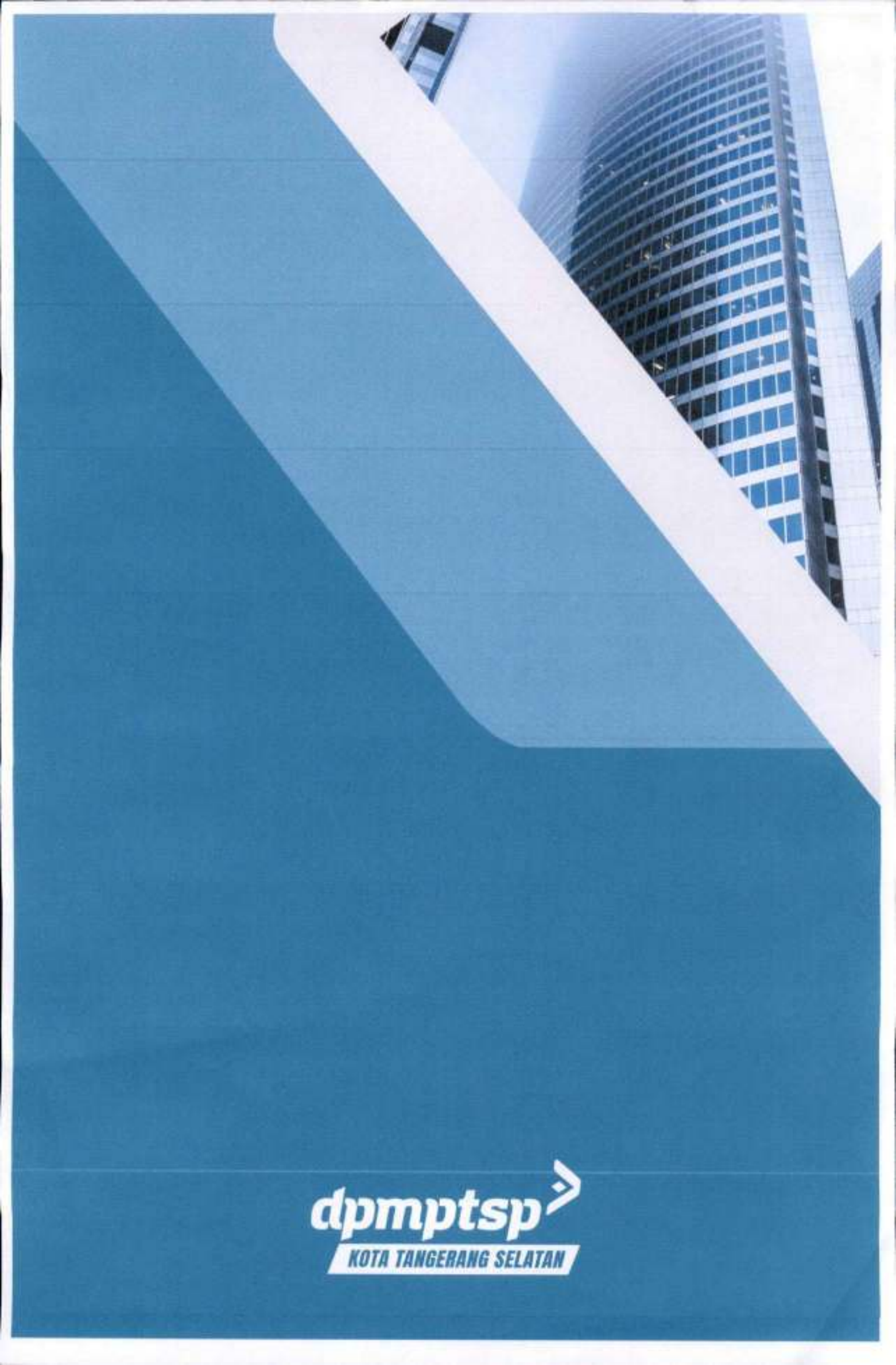
Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Tangerang Selatan.

Dengan disusunnya Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan pada Tahun Anggaran 2025.

Tangerang Selatan, Juli 2024

Kepala,
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Tangerang Selatan

H. MAULANA PRAYOGA U.P, ST, MIDS
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19780209 200212 1 007



dpmptsp

KOTA TANGERANG SELATAN